SKRIPSI

KONSOLIDASI KAUM MUDA DALAM MEMPERKUAT KETAHANAN SOSIAL DESA

(Suatu Studi Governing Pemerintah Kalurahan dalam Memperkuat Ketahanan Sosial Desa di Padukuhan Nologaten, Kalurahan Caturtunggal, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)

Disusun Oleh:

XAVERIANI ELFITRI NGANUR WULANDARI

18520112

ILMU PEMERINTAHAN

SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"

YOGYAKARTA

2022

SKRIPSI

KONSOLIDASI KAUM MUDA DALAM MEMPERKUAT KETAHANAN SOSIAL DESA

(Suatu Studi Governing Pemerintah Kalurahan dalam Memperkuat Ketahanan Sosial Desa di Padukuhan Nologaten, Kalurahan Caturtunggal, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)

Disusun Oleh:

XAVERIANI ELFITRI NGANUR WULANDARI

18520112

ILMU PEMERINTAHAN

SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"

YOGYAKARTA

2022

KONSOLIDASI KAUM MUDA DALAM MEMPERKUAT KETAHANAN SOSIAL DESA

(Suatu Studi Governing Pemerintah Kalurahan dalam Memperkuat Ketahanan Sosial Desa di Padukuhan Nologaten, Kalurahan Caturtunggal, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan Strata Satu (S1)
Program Studi Ilmu Pemerintahan

Disusun Oleh:

XAVERIANI ELFITRI NGANUR WULANDARI

NIM: 18520112

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN STRATA SATU(S1)
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"
YOGYAKARTA
2022

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Penguji untuk memenuhi persyaratan , memperoleh gelar Sarjana Strata 1 Jurusan Ilmu Pemerintahan pada Sekolah Tinggi Pembangunan Masayarakat Desa "APMD" Yogyakarta.

Hari : Senin

Tanggal : 10 Januari 2022

Jam : 9.00 – 11.00 WIB

Tempat : Ruangan Ujian Skripsi STPMD "APMD" Yogyakarta

TIM PENGUJI

NAMA	TANDA TANGAN
1. Drs. Sumarjono, M.Si Dosen Pembimbing	.....
2. Ir. Muhammad Barori, M.Si Dosen Penguji Samping I	.....
3. Fatih Gama Abisono Nasution, S. IP., M.A Dosen Penguji Samping II	.....

Mengetahui,

Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan

Dr. Gumo Tri Tjahjoko, M.A.

HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Xaveriani Elfitri Nganur Wulandari

Nim : 18520112

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul KONSOLIDASI KAUM MUDA DALAM MEMPERKUAT KETAHANAN SOSIAL DESA adalah benar-benar hasil karya sendiri dan seluruh sumber yang dikutip dan saya rujuk telah saya nyatakan dengan dengan benar.

Yogyakarta, 24 Januari 2022

Yang Membuat Pernyataan

Xaveriani Elfitri Nganur Wulandari

HALAMAN PERSEMBAHAN

Saya mengucapkan puji serta syukur kehadirat Tuhan yang Maha Esa dan Perantaraan Bunda Maria atas berkat, perlindungan dan tuntunan-Nya selama ini sehingga saya dapat mengerjakan dan menyelesaikan Skripsi ini. Dengan rasa tulus dan penuh kebanggaan, karya ini saya persembahkan sebagai ungkapan rasa terimakasih saya kepada semua orang yang senantiasa mendukung penyelesaian Skripsi ini dengan caranya masing-masing :

1. Terima kasih yang sebesar-besarnya saya ucapkan kepada kedua orang tua saya, Bapak Valentinus Nani dan Ibu Hermelinda Kurnia Tini atas doa, penguatan, dorongan dan semangat yang tiada henti diberikan kepada saya sepanjang waktu terkhusus supports yang sangat luar biasa selama pengerjaan Skripsi ini. Percayalah, bahwa kekuataan doa kalian, mengindahkan segalanya.
2. Terima kasih kepada Dosen Pembimbing saya Drs. Sumarjono, M.Si yang selalu mengarahkan dan memberikan pencerahan serta dengan setia membimbing saya dalam proses pengerjaan Tugas Akhir ini hingga selesai.
3. Terima kasih kepada Om Frengki, Om Gun, Om Bertus, Mama koe Rita, Mama koe Ochin, Mama Tua Velin, Tanta Rini, Tanta Nace, Tanta Ningsih, Bapa Tua Bene, Bapa Koe Hipo, dan Bapa Koe Incen yang senantiasa menyemangati saya hingga saat ini.
4. Terima kasih kepada keempat orang adik saya Pricilla Virgine Jelita, Ephivanya Trinita Julyanti, Vionetta Christine Nurhayati dan Valeri Putri Nani serta sahabat terbaik saya Stefanus Leo Agung, yang sudah mendukung saya penuh selama pengerjaan skripsi ini.
5. Terima kasih banyak untuk Almamater tercinta Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.
6. Terima kasih banyak untuk seluruh Anggota Kelompok Studi Tentang Desa (KESA) yang telah memberikan banyak hal positif untuk saya, telah menjadi rumah tempat

belajar yang menyenangkan dan terkhusus atas semua dorongan kepada saya selama pengerjaan Skripsi ini.

7. Terima kasih untuk teman-teman Winayaka English Family Club STPMD "APMD", Kak Bima, Kak Muti, Kak Joy, Kak Latifa, Kak Jean, Kak Mutiara, Kak Ayung, Pangki, Soleman, Ari, Kak Ari Surida, Rika dan teman-teman lainnya yang tidak bisa saya ucapkan satu persatu yang sudah mendukung saya dalam proses pengerjaan tugas akhir ini.
8. Terima kasih untuk sahabat-sahabat saya terkasih, Fr. Heri Kabut, Abe Padji, Tessy, Sri, Dewi, Isna, Ina Sinar, Charles Leu, Apin Baojen, Kakak Angel Jehanus, Sepupu saya Asri Mulyati. Teman-teman seperjuangan saya Enu Susan, Nur, Vinore, Vanti Darmin, Lius Servas, Alfred, Adi Bani, Hira, Ikmal, dan teman lainnya yang telah membantu dengan caranya masin-masing yang sudah memberikan saya semangat tanpa henti dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
9. Terima kasih untuk para senior dan teman-teman Ikatan Keluarga Besar Lembor Welak (IKALEWA) yang telah memberikan banyak dorongan bagi saya dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.
10. Terima kasih untuk *leader* dan teman-teman *International English Center* (IEC) Jogjakarta dan teman-teman Core Group yang telah memberikan banyak sekali support dan penguatan bagi saya dalam merampungkan skripsi ini, bagi Vanessa, Katie, Kak Laras, Kak Patricia dan Kak Atta, finally I did it!
11. Terima kasih untuk instruktur dan teman-teman *International Center for English Exchellence* yang telah menjadi wadah belajar bagi saya dan memberi saya semangat untuk mengerjakan Tugas Akhir ini.

MOTTO

”Tetapi kamu ini, kuatkanlah hatimu, janganlah lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu”

(2 Tawarikh 15:7)

“Karena masa depanmu sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang.”

(Amsal 23:18)

“Hidup adalah tantangan, jangan dengarkan omongan orang yang tidak jelas, yang penting kerja, kerja dan kerja. Kerja akan menghasilkan sesuatu, sementara omongan hanya menghasilkan alasan.”

(Ir. Joko Widodo)

“Lakukan apapun yang ingin kamu lakukan. Jadilah apa saja yang kamu inginkan dan cari tahu sebanyak-banyaknya tentang hal yang belum kamu ketahui dari dunia ini.”

(Emma Watson)

“Jangan berkecil hati dengan semua kekuranganmu, tetapi tetaplah melangkah menerobos batas dan lakukan yang terbaik!”

(Wulan Xaveriani)

KATA PENGANTAR

Puji serta syukur penulis haturkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala perlindungan, berkat dan rahmat yang tidak berkesudahan sehingga penyusunan skripsi dengan judul " KONSOLIDASI KAUM MUDA DALAM MEMPERKUAT KETAHANAN SOSIAL DESA ini dapat terselesaikan dengan baik dan lancar.

Penulisan Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Strata 1 Ilmu Pemerintahan.

Tentu saja terselesainya Skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Maka dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Almamater Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta sebagai tempat Penulis belajar, berproses dan menimba ilmu.
2. Bapak Drs. Sutoro Eko Yunanto, M.Si. selaku ketua STPMD"APMD" Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Guno Tri Tjahjoko, M,A, selaku ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan.
4. Bapak Drs. Sumarjono, M.Si selaku Dosen Pembimbing yang senantiasa membantu dan membimbing dalam proses penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak Ibu Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan yang selama ini memberi banyak ilmu dan pengetahuan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi.
6. Seluruh karyawan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta yang telah membantu melayani administrasi dalam penyelesaian skripsi penulis.
7. Bapak Agus Susanto selaku Lurah Kalurahan Caturtunggal tempat peneliti melakukan penelitian.
8. Bapak Aminudin Aziz selaku Carik Kalurahan Caturtunggal yang telah membantu peneliti mendapatkan informasi guna mengerjakan dan menyelesaikan skripsi ini.
9. Bapak Eko Sulistianto selaku dukuh Padukuhan Nologaten yang telah banyak membantu peneliti dalam memperoleh informasi guna mengerjakan dan menyelesaikan skripsi ini.

10. Seluruh pihak yang telah membantu dengan caranya masing-masing, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini.

Penulis menyadari masih banyak kesalahan dan kekurangan dalam Skrispi ini. Oleh karena itu, Penulis mengharapkan kritik dan saran demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat sebagaimana yang diharapkan dalam dunia ilmiah dan akademik.

Yogyakarta, 24 Januari 2021

Penulis,

Xaveriani Elfitri Nganur Wulandari

INTISARI

Penelitian ini berjudul "Konsolidasi Kaum Muda dalam Memperkuat Ketahanan Sosial Desa: Studi Governing Pemerintah Kalurahan dalam Memperkuat Ketahanan Sosial Desa di Padukuhan Nologaten, Kalurahan Caturtunggal, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta". Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan konsolidasi kaum muda dalam rangka memperkuat ketahanan sosial desa oleh pemerintah Kalurahan Caturtunggal dan mengetahui kendala-kendala dalam melakukan konsolidasi maupun kendala dalam memperkuat ketahanan sosial di desa.

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Obyek penelitian ini adalah Pemerintah Kalurahan Caturtunggal serta segala usahanya dalam melakukan konsolidasi kaum muda guna memperkuat ketahanan sosial di Padukuhan Nologaten, Kalurahan Caturtunggal.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kalurahan Caturtunggal abai terhadap keberadaan sub unit Karang Taruna di Padukuhan Nologaten. Pengabaian ini terlihat dari absennya Pemerintah Kalurahan Caturtunggal dalam melakukan pembinaan seperti pemberian petunjuk teknis, sosialisasi, penyuluhan, pembuatan regulasi, dan distribusi sumber daya, terhadap Karang Taruna di Padukuhan Nologaten. Absennya Pemerintah Kalurahan Caturtunggal dalam memperkuat Karang Taruna berimplikasi pada lemahnya kontribusi Karang Taruna dalam memperkuat ketahanan sosial di Padukuhan Nologaten. Selain itu, adanya kecenderungan fragmentasi di dalam tubuh Karang Taruna turut menghambat peran Karang Taruna dalam memperkuat ketahanan sosial di Padukuhan Nologaten.

Kata kunci: Pemerintah Desa, Konsolidasi Kaum Muda, Ketahanan Sosial.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dijelaskan bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Indonesia. Saat ini, desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Disahkannya UU Desa ini bertujuan untuk memberikan keleluasaan bagi Desa dalam mengatur dan mengurus urusan Desa sendiri serta memberikan kebebasan dalam melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat, serta mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat desa untuk pengembangan potensi dan aset desa guna kesejahteraan bersama.

Untuk mempermudah penyelenggaraan urusan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemasyarakatan, terbentuklah Pemerintahan Desa yang adalah suatu proses penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Pemerintahan desa ini dilaksanakan oleh pemerintah desa yang terdiri dari Kepala Desa atau yang disebut

dengan nama lain dan dibantu oleh perangkat desa sebagai unsur penyelenggara urusan Pemerintahan Desa.

Pemerintah Desa menjalankan roda kepemerintahan tentu merupakan implikasi dari pemberian legitimasi oleh masyarakat desa untuk memimpin, mengatur, mengurus, melindungi, mengarahkan dan melayani kepentingan masyarakat. Dalam teori Governing dijelaskan bahwa memerintah adalah suatu hal yang berbeda dengan menguasai. Perbuatan pemerintah dalam memerintah adalah penggunaan otoritas politik dengan mengedepankan fungsi kepemerintahan seperti pengaturan publik, penyediaan kebutuhan publik dan juga pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, Pemerintah Desa memiliki kewajiban untuk dapat mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya.

Untuk mempermudah Pemerintah Desa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, Pemerintah Desa tentu memerlukan mitra. Dalam UU Desa Nomor 6 Tahun 2014 Bab XII Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Desa Adat, dijelaskan bahwa Desa mendayagunakan Lembaga Kemasyarakatan Desa yang ada dalam membantu pelaksanaan fungsi penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Lembaga Kemasyarakat Desa merupakan wadah partisipasi masyarakat sebagai mitra pemerintah desa dimana Lembaga Kemasyarakatan Desa ini bertugas melakukan pemberdayaan masyarakat desa, ikut serta merencanakan dan melaksanakan pembangunan serta meningkatkan pelayanan masyarakat desa. Lembaga Kemasyarakatan Desa ini terdiri dari Rukun Tetangga, Rukun Warga, Pembinaan Kesejahteraan Keluarga, Karang Taruna dan lain sebagainya.

Sebagai salah satu lembaga kemasyarakatan yang menjadi mitra Pemerintah Desa, Karang Taruna adalah institusi di ranah desa yang dimotori oleh kepemudaan desa.

Berkenaan tentang Kepemudaan secara general terlegitimasi dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2009 dimana dijelaskan bahwa dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia sejak perintisan pergerakan kebangsaan Indonesia, pemuda berperan aktif sebagai ujung tombak dalam mengantarkan bangsa dan negara Indonesia yang merdeka, bersatu dan berdaulat, bahwa dalam pembaharuan dan pembangunan bangsa pemuda mempunyai fungsi dan peran yang sangat strategis sehingga perlu dikembangkan potensi dan perannya melalui penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan sebagai bagian dari pembangunan nasional untuk mewujudkan pembangunan nasional yang dimaksud, diperlukan pemuda yang berakhlak mulia, sehat, tangguh, cerdas, mandiri, dan profesional.

Peranan pemuda dalam masyarakat sangatlah penting. Setidaknya ada beberapa hal yang mendasari alasan mengapa pemuda memiliki tanggung jawab dalam tatanan masyarakat antara lain; a) kemurnian idealismenya; b) keberanian dan keterbukaanya dalam menyerap nilai-nilai dan gagasan-gagasan baru; c) semangat pengabdiannya; d) spontanitas dan pengabdiannya; e) inovasi dan kreativitasnya; f) keinginan untuk segera mewujudkan gagasan-gagasan baru; g) keteguhan janjinya dan keinginan untuk menampilkan sikap dan kepribadiannya yang mandiri; masih langkanya pengalaman-pengalaman yang dapat merelevansikan pendapat, sikap dan tindakannya dengan kenyataan yang ada (Taufik, 1974).

Salah satu langkah pemuda untuk membawa bangsa ini ke arah yang lebih baik adalah dengan berpartisipasi aktif dalam pembangunan masyarakat. Dalam konteks desa, pergerakan kaum muda di institusionalisasi dalam sebuah wadah kepemudaan seperti Karang Taruna. Karang Taruna merupakan ruang bagi pemuda desa untuk bertumbuh, berkembang, berkreasi dan berekspresi. Karang taruna merupakan salah satu

wadah pembinaan dan pengembangan generasi muda yang bertujuan untuk mewujudkan generasi muda aktif dalam pembangunan nasional dan pembangunan di bidang kesejahteraan sosial.

Karang Taruna, sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 77/HUK/2010 tentang Pedoman Dasar Karang Taruna adalah organisasi sosial kemasyarakatan sebagai wadah dan sarana pengembangan tiap anggota masyarakat yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial dari, oleh, dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah Desa/Kecamatan atau komunitas yang bergerak di bidang usaha kesejahteraan. Terdapat banyak aktivitas yang dimotori oleh Pemuda Desa seperti halnya dalam bidang olahraga, bidang keamanan, bidang kebudayaan dan kesenian, dan menjadi garda terdepan dalam pembangunan desa.

Menyadari pentingnya peran kaum muda dalam kehidupan masyarakat Padukuhan Nologaten, Kalurahan Caturtunggal, Kapanewon Depok, membentuk organisasi kepemudaan dalam bentuk Sub Unit Karang Taruna. Sub unit Karang Taruna yang pada kemudian menjalankan program kepemudaan yang bersifat produktif, rekreaktif, dan edukatif. Sampai saat ini, organisasi kepemudaan di Padukuhan Nologaten tetap eksis serta memiliki agenda rutin seperti selebrasi 17 Agustus dan Sumpah Pemuda serta agenda tidak rutin. Dikutip dari media, https://jogja.tribunnews.com Sub Unit Karang Taruna Padukuhan Nologaten telah menjalankan beberapa program seperti menginisiasi dan menyelenggarakan bazar Pasar Ramadhan, membuka Pasar Tiban, melaksanakan Bakti Sosial, mengikuti ronda malam untuk menjaga keamanan, melakukan aksi mural tertib, membantu dekor, membuka usaha cuci motor, agenda olahraga bersama, budidaya ikan kolam, membantu pengelolaan galeri dan memodifikasi lahan bekas pemancingan yang ada di Nologaten untuk berjualan dengan tujuan membangkitkan

perekonomian warga Nologaten. Beberapa program yang telah berhasil diprakarsai oleh kaum muda Padukuhan Nologaten adalah bagian dari kerja kolektif kaum muda menguatkan Padukuhan Nologaten dalam aspek sosial, ekonomi, keamanan, tradisi, dan kultur budaya bahkan selama pandemic Covid-19. Sub unit Karang Taruna Padukuhan Nologaten juga turut terlibat aktif membantu penanganan Covid-19 dengan terlibat dalam Satuan Tugas Covid-19 (Satgas Covid-19). Dapat disimpulkan bahwa adanya kepercayaan (trust) dari masyarakat terhadap eksistensi lembaga Karang Taruna di Padukuhan serta adanya keinginan baik (good will) dari kaum muda Padukuhan Nologaten untuk membangun Desa mulai dari Padukuhan sebab dalam pelaksanaan kegiatan, kaum muda padukuhan Nologaten berpartisipasi aktif, memberikan tenaga, waktu, dan mengerahkan modal sosial yang dimiliki dalam masyarakat Padukuhan Nologaten untuk menyukseskan kegiatan-kegiatan tersebut. Dimana dalam penyelenggaraan program kepemudaan, Sub Unit Karang Taruna Padukuhan Nologaten mengakumulasi modal atau biaya kegiatan dengan urungan (patungan), meminta pada masyarakat, dan memanfaatkan network yang para pemuda miliki untuk membantu pelaksanaan program.

Padukuhan Nologaten terdiri dari 4 RW dengan karakter kondisi lingkungan yang berbeda, begitu pula dengan dinamika kepemudaan di dalamnya. Sebelum terintegrasi menjadi satu unit Karang Taruna Padukuhan Nologaten pada 2020 lalu, gerakan kepemudaan Nologaten seringkali dijalankan berdasarkan kewilayahan RW. Meskipun sudah dijadikan satu dalam satu wadah gerakan kepemudaan, hanya terdapat dua (2) organisasi kepemudaan yang masih aktif untuk berdinamika, yaitu di RW 4 dan RW 1. Salah satu faktor yang menyebabkan mandeknya dinamika organisasi kepemudaan di Padukuhan Nologaten adalah tergerusnya kekompakan dan kepedulian pemuda desa.

Hal ini disebabkan oleh beberapa hal yaitu: Pertama, perkembangan teknologi yang begitu cepat sehingga menumbuhkan individualisme pada diri kaum muda. Kedua, komposisi keanggotaan Karang Taruna yang didominasi oleh anak-anak sekolah dan masih banyak yang belum memahami urgensi keterlibatan dalam organisasi kepemudaan berserta tugas dan perannya. Ketiga, belum adanya kerjasama Karang Taruna Padukuhan dengan Karang Taruna Kalurahan juga berdampak pada minimnya kolektivitas dalam mencapai kepemudaan desa yang proaktif dan kolegial. Keempat, minimnya upaya penguatan atau konsolidasi yang efektif dari Pemerintah Kalurahan setempat untuk memfasilitasi organisasi kepemudaan ini. Minimnya support seperti pelatihan dan pembinaan yang efektif serta pembiayaan yang kurang didukung oleh Pemerintah setempat juga menyebabkan Karang Taruna harus melakukan swadaya secara mandiri dalam mengakumulasi dana guna merealisasikan program.

Kondisi inilah yang membuat kaum muda tidak dapat berkontribusi secara maksimal dalam pembangunan. Terlebih khusus dalam menangkal segala Ancaman, Tantangan, Hambatan, dan Gangguan. Dalam mewujudkan desa yang berketahanan sosial, Karang Taruna sebagai organisasi kepemudaan desa harus berjibaku secara kooperatif dan kolektif menyikapi setiap perubahan yang terjadi di setiap lini kehidupan Desa. Ketahanan sosial merupakan daya tahan suatu kelompok masyarakat dalam menghadapi hantaman perubahan. Dalam dinamikanya, kelompok melakukan adaptasi selama masa transisi dengan bertahan, menerima atau menolak perubahan tersebut serta berupaya untuk bangkit dari keterpurukan tersebut.

Sebagai kelompok yang memiliki lingkup kegiatan di lingkungan Padukuhan, Karang Taruna adalah aktor yang diharapkan menjadi garda terdepan yang kuat dan handal dalam memberikan proteksi bagi masyarakat desa serta secara total menjadi

mitra pemerintah desa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat terkhusus dalam mewujudkan desa yang berketahanan sosial. Pentingnya peran kaum muda dalam memperkuat ketahanan sosial setidaknya ditunjukkan oleh beberapa penelitian berikut.

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Gina Lestari, Armaidy Armawi, dan Muhammad pada tahun 2016. Penelitian ini berjudul "Partisipasi Pemuda Dalam Mengembangkan Pariwisata Berbasis Masyarakat Untuk Meningkatkan Ketahanan Sosial Budaya Wilayah". Penelitian ini dilaksanakan di Desa Wisata Pentingsari, Desa Umbulharjo, Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan merumuskan partisipasi pemuda dalam pengembangan pariwisata berbasis masyarakat (community based tourism) dan kontribusinya terhadap ketahanan sosial budaya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemuda merupakan bagian dari aktor pengelola community based tourism di Desa Wisata Pentingsari. Partisipasi pemuda berada pada tingkat partisipasi citizen power dengan bobot rata-rata 70 persen. Model pengembangan community based tourism di Desa Wisata Pentingsari berkontribusi terhadap ketahanan sosial budaya wilayah berdasarkan parameter asas kemitraan kesejahteraan, perlindungan, kemandirian, kerukunan, nilai sosial dan budaya lokal. Ketahanan sosial dan budaya wilayah terbentuk melalui pelestarian sosial budaya secara dinamis dengan melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan sosial- budaya lokal melalui aktivitas pariwisata (Lestari, dkk, 2016).

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Tiana Nirmalasari dan Novi Widiastuti pada tahun 2018. Penelitian ini berjudul "Peran Tokoh Pemuda Dalam Meningkatkan Partisipasi Karang Taruna di Desa Nanjung Margaasih". Penelitian ini dilaksanakan di RW 03, Desa Nanjung, Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung,

Provinsi Jawa Barat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran tokoh pemuda dalam meningkatkan partisipasi Karang Taruna adalah dengan membimbing, membina, dan memberikan inovasi. Adapun bentuk partisipasi tokoh pemuda dalam dinamika Karang Taruna berbentuk partisipasi menggunakan harta, partisipasi menggunakan tenaga, partisipasi menggunakan uang, partisipasi menggunakan pikiran, dan partisipasi menggunakan keterampilan (Nirmalasari dan Widiastiti, 2018).

Ketiga, Penelitian yang dilakukan oleh Anak Agung Istri Andriyani pada tahun 2017 yang berjudul "Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Desa Wisata Dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Sosial Budaya Wilayah". Penelitian ini dilakukan di Desa Wisata Penglipuran Bali Provinsi Bali. Penelitian ini bertujuan ini memahami berlangsungnya proses pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan di Desa Wisata Penglipuran dan implikasinya terhadap ketahanan sosial budaya wilayah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pemberdayaan masyarakat di Desa Wisata Penglipuran berlangsung dalam tiga tahap yaitu tahap penyadaran, pengkapasitasan, dan pemberian daya. Bentuk-bentuk pemberdayaan masyarakat melibatkan partisipasi masyarakat mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Adapun kendala-kendala dalam pemberdayaan masyarakat berkaitan dengan usaha mempertahankan budaya dan adat istiadat dari arus modernisasi, sikap masyarakat, sumber daya manusia, dan ketersediaan akomodasi wisata serta kurangnya kegiatan promosi. Pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan desa wisata memberikan implikasi terhadap ketahanan sosial budaya wilayah berupa penguatan dan beberapa perubahan pada tata nilai sosial, budaya dan lingkungan (Andrayani, 2017).

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh A. Oka Suradiva dan Saryani pada tahun 2018 yang berjudul "Partisipasi Pemuda Dalam Berkembangnya Desa Wisata Guna

Meningkatkan Ketahanan Sosial Budaya Masyarakat Desa". Penelitian ini dilaksanakan di Desa Wisata Batubulan, Sukawati Gianyar, Bali. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui partisipasi pemuda dan upaya mereka dalam pengembangan desa wisata guna meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat desa. Hasil penelitian menunjukan bahwa pemuda hanya sebagai aktor pendukung dalam pengelolaan desa wisata di Desa Batubulan. Kehidupan sosial budaya masyarakat asli Desa Batubulan menjadi faktor utama pariwisata dan pemuda dengan kehidupan masyarakat adat serta organisasi yang menjadi wadah terbukti mampu menjaga ketahanan sosial budaya. Ketahanan sosial budaya secara dinamis lahir dan terbentuk melalui pelestarian sosial budaya dengan cara melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan potensi sosial budaya lokal melalui aktivitas pariwisata (Suradiva, 2018).

Kelima, penelitian yang dilakukan Aldita Cindy Arfidiandra, Riana Rahmaningrum, Wazirul Luthfi, pada tahun 2020 yang bertajuk "Ketahanan Sosial Berbasis Kelompok Peduli Lingkungan Dalam Menghadapi Pandemi Covid-19: Studi Pada Gerakan Bersih Kecamatan Anggana". Penulis mengatakan bahwa kemunculan pandemic Covid-19 memberikan dampak pada aspek kehidupan masyarakat yang mendorong adanya perubahan. Hal ini menjadikan institusi lokal seperti Gerakan Bersih Kecamatan Anggana (GBKA) berupaya menghadapi perubahan tersebut. Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan upaya GBKA mewujudkan ketahanan sosial melalui cara dan pendekatan kelompok dalam menghadapi kondisi pandemi Covid-19. Penelitian menemukan bahwa unsur Betulungan atau tolong menolong sebagai nilai kearifan lokal yang dimiliki masyarakat berperan penting dalam dinamika kelompok untuk mewujudkan ketahanan sosial. Betulungan menjadi potensi dalam rangkaian proses

adaptasi kelompok guna mempertahankan eksistensi GBKA di tengah pandemi Covid-19.

Kelima penelitian di atas menegaskan urgensi pembinaan Karang Taruna sebagai bagian dari lembaga kemasyarakatan desa. Karang Taruna telah bertumbuh menjadi salah satu lembaga kemasyarakatan yang kuat. Dengan begitu, eksistensi Karang Taruna perlu didukung oleh berbagai pihak terutama Pemerintah Desa. Dukungan dari Pemerintah Desa terutama dimanifestasikan dalam bentuk kebijakan, program, dan kegiatan yang berorientasi pada pembinaan kemasyarakatan desa. Sebab pada hakikatnya, pemerintah adalah pelayanan masyarakat.

Peran serta Pemerintah Desa dalam pembinaan kemasyarakatan desa dilegitimasi di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Dalam Pasal 18 ditegaskan bahwa salah satu kewenangan Pemerintah Desa adalah bidang pembinaan kemasyarakatan desa. Bidang pembinaan kemasyarakatan desa merupakan salah satu bagian dari kewenangan lokal berskala desa. Bidang pembinaan kemasyarakatan desa meliputi: (1) membina keamanan, ketertiban, dan ketentraman wilayah dan masyarakat desa; (2) membina kerukunan warga masyarakat desa; dan (3) melestarikan dan mengembangkan gotong royong masyarakat desa. Pembinaan kemasyarakatan harus dilakukan berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan adat-istiadat desa.

Pemberian kewenangan pembinaan kemasyarakatan desa bertujuan untuk mencapai kemandirian desa. Kemandirian desa hanya bisa dicapai apabila desa diberi ruang untuk mendayagunakan segala sumber daya yang dimilikinya termasuk Karang Taruna. Sebab Karang Taruna merupakan salah satu bagian dari lembaga kemasyarakatan desa dan merupakan wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Desa, ikut serta

dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat.

Untuk mengoptimalkan tugas, fungsi dan peran dari Karang Taruna ini sendiri, Pemerintah Desa atau Kalurahan dapat memberikan pembinaan yang juga didukung oleh kewenangan pemberdayaan masyarakat, karena inti kedua kewenangan ini adalah meningkatkan (enhance) dan menguatkan (consolidate) eksistensi masyarakat di segala lini kehidupan. Pemberian kewenangan kepada Pemerintah Desa dilatari oleh argumen bahwa Pemerintah Desalah yang paling memahami kepentingan warganya. Pemerintah Desa/Kalurahan dapat mengatur keorganisasian Karang Taruna dan mengurus Karang Taruna dengan memberikan penyadaran, pengkapasitasan, dan pengembangan agar lebih berdaya guna dan dapat menjadi mitra pemerintah dalam memberikan pelayanan.

Berangkat dari fenomena di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang urgensi konsolidasi kaum muda dalam pembangunan desa. Oleh karena itu, penelitian ini secara tegas hendak mengungkap "KONSOLIDASI KAUM MUDA DALAM MEMPERKUAT KETAHANAN SOSIAL DESA".

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari alur persoalan yang ada di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah "Bagaimana Pemerintah Kalurahan Caturtunggal Melakukan Konsolidasi Terhadap Kaum Muda Dalam Memperkuat Ketahanan Sosial Desa?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Mendeskripsikan konsolidasi kaum muda dalam rangka memperkuat ketahanan sosial desa oleh Pemerintah Kalurahan Caturtunggal; dan
2. Mengetahui kendala-kendala di dalam melakukan konsolidasi maupun kendala dalam memperkuat ketahanan sosial di desa.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian yang disajikan ini, diharapkan dapat bermanfaat baik untuk kepentingan akademis maupun untuk kepentingan praktis.

1. Manfaat Akademis
    a. Dapat memperkaya pengetahuan tentang upaya konsolidasi kaum muda dalam rangka memperkuat ketahanan sosial;
    b. Dapat bermanfaat bagi mahasiswa ilmu pemerintahan dan politik dalam melihat secara kritis kebijakan yang diformulasikan oleh pemerintah; dan
    c. Menambah pengetahuan dan melengkapi pembahasan konsep pembinaan dan pemberdayaan pemuda.
2. Manfaat Praktis
    a. Bagi Pemerintah Kaluruhan Caturtunggal

    Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi dalam memahami pentingnya pembinaan dan pemberdayaan kaum muda secara inklusif.

b. Bagi Karang Taruna Secara Umum

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan motivasi dalam melakukan pengembangan lembaga Karang Taruna.

c. Bagi Masyarakat

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan support bagi masyarakat untuk terus berkontribusi dalam pembangunan desa melalui semangat kolektif kolegial bersama lembaga kemasyarakatan yang ada.

E. Kerangka Konseptual

Pada dasarnya, upaya untuk menjadikan desa sebagai entitas yang kuat, maju, mandiri, dan demokratis bukan hanya menjadi tugas pemerintah desa. Akan tetapi, itu merupakan tugas semua elemen yang ada di dalam desa yaitu pemerintah dan masyarakat. Hal yang sama juga berlaku untuk mewujudkan desa yang berketahanan sosial. Dalam rangka mewujudkan desa yang berketahanan sosial, penting untuk mengarahkan perhatian pada pemahaman tentang pemerintah yang kuat dan masyarakat yang kuat. Pemerintah yang kuat berarti kapasistas pemerintah dalam mengelola pelayanan publik dan pembangunan untuk kesejahteraan, serta memproteksi wilayah, manusia, dan sumber daya alam. Sedangkan masyarakat kuat berarti mempunyai kekuasaan untuk terlibat aktif dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat. Singkatnya, pemerintah dan masyarakat yang kuat merupakan pintu masuk menuju desa yang kuat, yaitu desa yang mandiri dan otonom dalam mengambil keputusan secara mandiri, sekaligus kebal dari pengaruh berbagai kelompok ekonomi politik dan kekuatan eksternal yang mengganggu kehidupan desa.

Untuk mengungkap ketahanan sosial di desa, secara khusus di Padukuhan Nologaten, penelitian ini dipandu oleh persepektif governing. Persepktif governing dipakai untuk mengungkap kapasitas pemerintah dalam mengatur dan mengurus desa terutama dalam kaitannya dengan penyelenggaraan pembuatan regulasi, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat. Singkatnya, perspektif governing dipakai untuk mengungkap kapasitas pemerintah dalam menjalankan kewenangan menyelenggarakan urusan pemerintahan. Selain itu, persektif governing digunakan untuk melihat kapasitas pemerintah dalam mendayagunakan elemen yang ada di desa seperti Lembaga Kemasyarakatan Desa secara khusus Karang Taruna dalam mewujudkan cita-cita desa yang berketahanan sosial.

1. Konsep Pemerintahan Desa

Pemerintah desa adalah bagian dari birokrasi modern yang bertugas mengelola barang-barang publik termasuk melakukan pungutan pajak pada masyarakat. Sebagai institusi modern, pemerintah desa tidak hanya cukup memainkan legitimasi simbolik dan sosial tetapi harus membangun legitimasi yang dibangun dari dimensi kinerja politik dan ekonomi. Penyelenggara pemerintah desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus warganya (Widjaja, 2003: 3).

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa disebutkan bahwa pemerintah desa merupakan penyelenggara pemerintahan. Adapun yang dimaksud dengan pemerintah desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat Desa atau yang disebut dengan nama lain. Adapun perangkat desa terdiri dari sekretariat Desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis. Jadi, kesatuan antara Kepala Desa dan perangkat Desa itulah yang disebut

dengan pemerintah desa. Dengan kalimat lain, pemerintah desa terdiri dari Kepala Desa dan perangkat Desa.

Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Meskipun desa bukan hanya sekadar pemerintahan desa, bukan hanya sekadar pemerintah desa serta bukan hanya sekadar kepala desa, tetapi kepala desa menempati posisi paling penting dalam kehidupan desa. Semangat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menempatkan kepala desa bukan sebagai kepanjangan tangan pemerintah, melainkan sebagai pemimpin masyarakat. Artinya, kepala desa harus mengakar dekat dengan masyarakat, sekaligus melindungi, mengayomi, dan melayani warga masyarakat (Sutoro Eko, dkk, 2014: 158). Bersama perangkat desa, kepala desa sebagai pemimpin struktur pemerintah desa memiliki peran yang signifikan dalam pengelolaan proses sosial dan masyarakat. Oleh karena itu, penyelenggaraan pemerintahan desa tidak terpisahkan dari koordinasi yang baik antara Kepala Desa dan perangkat desa.

a) Struktur Organisasi Pemerintah Desa

Struktur organisasi pemerintah menggambarkan tentang pembagian kewenangan, tugas, fungsi dan tanggung jawab, baik kepada unit-unit kerja maupun perorangan dalam organisasi pemerintahan desa. Selain itu, struktur organisasi juga menggambarkan tata kerja yang memberi kejelasan alur perintah, koordinasi, dan tanggung jawab baik secara hierarki-vertikal maupun relasi-horizontal.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa telah menentukan secara implisit tentang struktur organisasi tersebut yang tergambarkan dari

ketentuan mengenai: (1) kedudukan, tugas, wewenang, hak, dan kewajiban kepala desa; dan (2) susunan perangkat desa yang terdiri dari sekretariat desa, pelaksanaan kewilayahan, dan pelaksanaan teknis. Meskipun demikian UU Nomor 6 Tahun 2014 tidak menentukan secara eksplisit mengenai struktur organisasi pemerintah desa, tetapi mendelegasikan untuk pengaturan lebih lanjut mengenai pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa kepada peraturan pemerintah.

Berikutnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 mengatur lebih detail mengenai kepala desa dan perangkat desa. Untuk perangkat desa telah ditentukan mengenai jumlah unsur sekretariat, pelaksanaan kewilayahan dan pelaksana teknis, yang menggambarkan mengenai unit-unit kerja dalam organisasi pemerintah desa. Tidak ada pendelegasian secara eksplisit untuk pengaturan lebih lanjut mengenai struktur organisasi pemerintah desa kepada peraturan menteri. Akan tetapi, dalam pasal 62 dan 64 menentukan bahwa urusan dan pelaksana teknis diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa mengatur lebih detail mengenai Perangkat Desa, antara lain sebagai berikut:

a. Jumlah urusan atau unit kerja dalam sekretariat desa, pelaksana kewilayahan dan pelaksana teknis, serta sebutan pejabat yang memimpin, yakni: (1) Sekretariat Desa paling banyak terdiri atas 3 urusan yakni Urusan Tata Usaha dan Umum, Urusan Keuangan, dan

Urusan Perencanaan, dan paling sedikit 2 yaitu Urusan Umum dan Perencanaan, dan Urusan Keuangan. Masing-masing dipimpin oleh Kepala Urusan; (2) Jumlah unsur pelaksana kewilayahan ditentukan secara proporsional antara pelaksanaan kewilayahan yang dibutuhkan dengan kemampuan keuangan desa serta memperhatikan luas wilayah kerja, karakteristik, geografis, kepadatan penduduk, serta sarana prasarana penunjang tugas. Unsur pelaksana teknis masing-masing dipimpin oleh kepala dusun atau sebutan lain serta peraturan bupati; (3) Pelaksana teknis paling banyak terdiri atas 3 seksi yaitu Seksi Pemerintahan, Seksi Kesejahteraan, dan Seksi Pelayanan, paling sedikit 2 seksi yaitu Seksi Pemerintahan, serta Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan;

b. Jumlah urusan dikaitkan dengan jelas desa, yakni: (1) Desa swasembada wajib memiliki 3 urusan dan 3 seksi; (2) Desa swakarsa dapat memiliki 3 urusan dan 3 seksi; (3) Desa swadaya memiliki 2 (dua) urusan dan 2 (dua) seksi;

c. Kedudukan, tugas, dan fungsi mulai dari kepala desa, sekretariat desa, urusan-urusan, pelaksana kewilayahan, dan seksi-seksi;

d. Dalam menjalankan tugasnya, kepala desa bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan; dan

e. Pengaturan lebih lanjut mengenai susunan organisasi dan tata kerja (SOTK) pemerintah desa dan perangkat desa ditetapkan dalam peraturan bupati/walikota (Triputro, 2019: 58-59).

b) Kewenangan Pemerintah Desa

Kewenangan Pemerintah Desa adalah hak untuk mengatur, mengurus dan bertanggung jawab atas urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Kewenangan mengatur dan mengurus tersebut ditujukan kepada urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Urusan pemerintahan pada dasarnya mencakup tiga fungsi yang dijalankan oleh pemerintah, yaitu: pengaturan (public regulation), pelayanan publik (public goods), dan pemberdayaan masyarakat (empowerment). Pengaturan merupakan kegiatan mengatur (membuat peraturan tentang perintah yang harus dijalankan dan larangan yang harus dihindari) tentang pemanfaatan barang-barang publik seperti pendidikan, kesehatan, jalan, laut, sungai, hutan, kebun, air, udara, uang dan lain-lain. Sedangkan pemberdayaan adalah fungsi pemerintah memperkuat kemampuan masyarakat dalam mengakses dan memanfaatkan barang-barang publik tersebut serta mengembangkan potensi dan aset yang dimiliki masyarakat.

Apa yang disebut dengan kepentingan masyarakat setempat sebenarnya juga tercakup sebagai urusan pemerintahan. Tetapi ada perbedaan khusus antara urusan pemerintahan dengan kepentingan masyarakat setempat. Urusan pemerintahan berkaitan dengan pelayanan publik kepada warga yang sudah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Sementara kepentingan masyarakat setempat adalah kebutuhan bersama masyarakat yang terkait dengan

penghidupan dan kehidupan sehari-hari masyarakat, muncul dari prakarsa masyarakat, berskala dan bersifat lokal (setempat) (Sutoro Eko, 2015: 101).

Berdasarkan pemaparan di atas, Peneliti menyimpulkan bahwa kewenangan pemerintah desa yaitu hak untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang mencakup pengaturan (public regulation), pelayanan publik (public goods), dan pemberdayaan masyarakat (empowerment). Kewenangan pemerintah desa dijalankan berdasarkan prakarsa masyarakat dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran masyarakat setempat.

2. Konsep Ketahanan Sosial

Ketahanan sosial secara konseptual didefinisikan sebagai kemampuan individu atau kelompok untuk secara tepat waktu bertindak ketika keadaan stabil dan segera beradaptasi, mengatur diri, dan tetap aktif terlibat dalam merespon kondisi yang tidak menentu (Leitch, 2017). Konsep tersebut mengandung tiga dimensi pokok yaitu kemampuan atau kapasitas untuk mengidentifikasi dan mengelola persoalan (copying capacities), kemampuan untuk menyesuaikan diri pada kondisi tak menentu (adaptive capacities) dan kemampuan berubah menyesuaikan tuntutan kondisi yang juga berubah (transformative capacities) (Keck dan Sakdalporak, 2013:5).

Ketahanan sosial adalah bagian integral dari ketahanan nasional. Hakikat dari ketahanan sosial adalah suatu kondisi yang dinamis dari suatu bangsa yang terdiri atas ketangguhan serta keuletan dan kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi segala macam dan bentuk Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan (ATHG) baik yang datang dari dalam maupun dari luar, secara langsung maupun tidak secara langsung yang mengancam dan

membahayakan integrasi, identitas, kelangsungan hidup bangsa dan negara serta perjuangan dalam mewujudkan tujuan perjuangan nasional.

Ada dua pandangan tentang ketahanan sosial yaitu: Pertama, menyatakan bahwa ketahanan sosial merupakan bagian integral dari ketahanan nasional, selain ketahanan ekonomi, politik, budaya dan pertahanan-keamanan. Jadi, ketahanan sosial seperti halnya ketahanan ekonomi, politik, budaya dan militer merupakan unsur pembentuk ketahanan nasional. Pandangan lain menyebutkan bahwa ketahanan sosial merupakan kemampuan komunitas (local grassroot community) dalam memprediksi, mengantisipasi, dan mengatasi perubahan sosial yang terjadi, sehingga masyarakat dapat tetap koeksistensi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kedua, ketahanan sosial suatu komunitas sering dikaitkan dengan kemampuannya mengatasi risiko akibat perubahan sosial, ekonomi, politik yang mengelilinginya. Ketahanan sosial juga menggambarkan kemampuan bertahan di tingkat sistem lokal dari arus globalisasi dan desentralisasi. Ketahanan sosial menunjukan adanya kemampuan komunitas untuk menghindari dan atau mengelola konflik, mencari berbagai solusi, seiring dengan perkembangan komunitas itu sendiri. Ketahanan sosial mencakup kemampuan internal untuk menggalang konsensus dan mengatur sumber daya dan faktor eksternal yang dapat menjadi sumber ancaman, namun dapat diubah menjadi peluang. Jadi, ketahanan sosial merupakan produk interaksi dinamis antara faktor eksogen dengan endogen, sehingga kemampuan tersebut menunjukan adanya aspek dinamika dan keseimbangan (community homeostatic and dynamic).

Kemampuan di sini bukan hanya sekadar kemampuan bertahan tetapi di dalamnya ada unsur dinamik yaitu kemampuan untuk segera kembali pada kondisi

semula atau justru lebih baik lagi. Ketahanan sosial bukanlah final product tetapi sebagai proses dan dinamika masyarakat. Jadi secara singkat definisi konsep ketahanan sosial merupakan daya tahan suatu kelompok masyarakat dalam menghadapi hantaman perubahan serta mampu mengubah ancaman dan tantangan menjadi peluang dan kesempatan.

Sebagai bagian integral dari ketahanan nasional, ketahanan sosial pada hakikatnya memegang teguh azaz kekeluargaan yang mengandung unsur kearifan, keadilan, kebersamaan, kesamaan, gotong royong, tenggang rasa, dan tanggung jawab dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat. Azaz ini mengakui adanya perbedaan. Perbedaan tersebut harus dikembangkan secara serasi dalam hubungan kemitraan agar tidak berkembang menjadi konflik yang bersifat saling menghancurkan. Sebab tujuan utama ketahanan sosial ini pada dasarnya adalah untuk menghadapi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan (ATHG) (Sadewo, 2020: 12). Agar semakin kuat ketahanan sosial suatu daerah, maka semakin dapat menjamin kelangsungan hidup atau survival dalam kehidupan bermasyarakat.

Dalam tataran Desa, Desa berketahanan sosial disebut juga desa yang berdaya. Ketahanan mempunyai tiga dimensi yaitu ketahanan sosial yang bisa disebut juga kohesi sosial, merupakan elemen yang penting dalam membina masyarakat desa. Hal ini mencakup kerukunan, kegotongroyongan, kebersamaan, solidaritas, toleransi, dan lain-lain yang biasa disebut modal sosial. Masyarakat desa sudah lama mempunyai beragam ikatan sosial dan solidaritas sosial sebagai penyangga kehidupan dan penghidupan masyarakat desa. Swadaya dan gotong royong telah terbukti menjadi penyangga utama “otonomi asli “desa. ketika negara sudah tidak

sanggup menjangkau level desa, swadaya dan gotong royong masyarakat merupakan sebuah alternatif yang memungkinkan sebagai proyek prasarana desa dibangun.

Di luar itu, masyarakat desa mempunyai tradisi saling membantu ketika diterpa musibah (Sutoro Eko, 2017: 88-90). Namun, di balik ikatan dan solidaritas sosial itu, masyarakat desa sering mengalami kerentanan sosial yang bahkan bisa melumpuhkan ketahanan sosial.

Seperti yang sempat disinggung sebelumnya bahwa dalam lingkup masyarakat desa terdapat apa yang disebut "modal sosial" yang terdiri dari ikatan sosial (social bonding), jembatan sosial (social bridging), dan jaringan sosial (social linking). Ikatan sosial adalah bentuk dan tingkat modal sosial dalam komunitas yang paling rendah, dengan hubungan sosial (dibangun berdasarkan kesamaan identitas yang homogen atau berdasarkan ikatan parokhial seperti keagamaan, kekerabatan, kesukuan) yang lebih berorientasi eksklusif. Jembatan sosial merupakan bentuk modal sosial dalam komunitas lokal yang lebih terbuka dan inklusif dan heterogen melampaui ikatan parokhial yang cocok untuk membangun kerukunan, perdamaian, maupun kohesi sosial. Sedangkan jaringan sosial adalah modal sosial yang melampaui komunitas lokal, berorientasi keluar dan berjejaringan lebih luas dengan dunia luar (Briggs, 1998; Woolock dan Narayan, 2000; Putnam, 2000; Portes dan Landolt, 2000; Woolock, 2001).

Selain bentuk ketiga modal tersebut terdapat dua aspek yang sangat krusial yakni solidaritas sosial dan gerakan sosial. Solidaritas sosial dalam bentuk tolong-menolong berada pada rentang ikatan sosial dan jembatan sosial. Sedangkan gerakan sosial berada di atas tingkat jaringan sosial gerakan sosial dalam bentuk organisasi warga atau organisasi masyarakat sipil pada level desa, daerah, dan nasional

merupakan institusi sipil yang menaruh perhatian pada isu- isu publik dan kepentingan warga. Sehingga menjadi kekuatan yang mendorong tumbuhnya demokrasi. Oleh karena itu, untuk membangun desa yang berdaya sosial, dibutuhkan penguatan pada sisi solidaritas sosial, jembatan sosial, jaringan sosial dan gerakan sosial. Ini selaras dengan UU Nomor 6 Tahun 2014 yang mengamanatkan desa sebagai basis untuk solidaritas sosial, jembatan sosial, jaringan sosial dan gerakan sosial.

Seperti halnya yang terjadi di Padukuhan Nologaten bahwa fenomena resonansi globalisasi yang kian masif turut mempengaruhi kultur sosial masyarakat. Dapat dikatakan bahwa perkembangan, kemajuan teknologi dan media sosial yang berkembang pesat telah menggerus kekompakan antar kaum muda di Karang Taruna Nologaten. Ketiadaan ruang yang mewadahi kebersamaan kelompok kepemudaan ini dapat menjadi symptom meningkatnya individualistis yang mengakibatkan pemuda di Karang Taruna terdisintegrasi dan bertendensi pasif dalam ikut melakukan perubahan. Tentu hal ini berkontradiksi dengan militansi dan sikap proaktif kaum muda yang diharapkan senantiasa melakukan perubahan dan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai sosial.

Peneliti menyimpulkan bahwa, keterlibatan aktif Sub Unit Karang Taruna di Padukuhan Nologaten seperti mengikuti gotong royong adalah bentuk kontribusi kaum muda dalam melestarikan entitas asli masyarakat yang menjunjung tinggi kebersamaan dan upaya menguatkan ketahanan sosial. Sebab gotong royong sendiri merupakan salah satu nilai yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia yang diawali dengan pendekatan saling tolong-menolong dalam kehidupan

bermasyarakat untuk menyelesaikan beberapa kegiatan yang memerlukan banyak dukungan sumber daya.

Partisipasi Karang Taruna Padukuhan Nologaten tidak hanya berdedikasi memberikan tenaga dalam mengikuti kegiatan gotong royong namun mengerahkan segala kemampuan untuk dapat produktif memperoleh dana secara mandiri atau iuran untuk dapat merealisasikan program seperti menyediakan ruang untuk mengakrabkan masyarakat padukuhan Nologaten antargenerasi. Melalui kerja produktif ini, maka akan semakin terpupuk kolektivitas dan semangat kekeluargaan dalam diri masyarakat (society) yang akan memberikan pengaruh lebih lanjut terhadap ketahanan sosial desa.

Padukuhan Nologaten terletak di daerah perkotaan. Kehidupan di Padukuhan Nologaten tidak terlepas dari interaksi masyarakat sekitar. Masyarakat di Nologaten masih kental dengan gotong-royong, kerja bakti, serta jadwal ronda. Selain itu, masyarakat di Padukuhan Nologaten masih melestarikan kegiatan kebudayaan yang dimilikinya. Dalam rangka melestarikan kegiatan kebudayaan ini, masyarakat di Padukuhan Nologaten masih melakukan berbagai kegiatan seperti karawitan, gejog lesung, menyanyikan lagu-lagu daerah, tari-tarian, karnaval dalam rangka memperingati hari Kemerdekaan Negara Republik Indonesia (17 Agustus) dengan memakai pakaian petani atau dengan kreasi sayur-sayuran.

3. Governing Theory

Pengertian dasar memerintah yaitu Exercising Political Authority, penggunaan otoritas politik yang dipegang oleh pemerintah. Pemerintahan adalah perbuatan pemerintah memerintah negara, masyarakat, pasar, warga, ekonomi, kehidupan sosial dan lain sebagainya. Pemerintahan adalah perbuatan pemerintah melakukan

transformasi dari manusia menjadi rakyat, serta rakyat menjadi warga. Perbuatan memerintah mencakup fungsi, tindakan, proses dan cara. Konsep meso mikro Governing (G2) adalah terdiri dari reformasi, inovasi, proteksi, distribusi, provisi, alokasi, rekognisi, intervensi, imposisi, emansipasi, penetrasi, integrasi, privatisasi, represi, koersi dan lain sebagainya (Peta Penelitian Pemerintahan, 2020). Dengan demikian, memerintah tidak identik dengan perintah meski mengandung perintah.

Stephen Cook (2007), dalam bukunya yang berjudul "*Rulling but not Governing*" mengemukakan bahwa terdapat perbedaan memerintah dan menguasai *(governing dan rulling).* Gagasan ini muncul berangkat dari sejarah perkembangan Militer dan Politik di Mesir yang mana Militer mendominasi dinamika politik dan lini kehidupan masyarakat. Tetapi, kekuatan militer ini tidak menjadi pemerintah karena dia tidak memiliki kewenangan mengatur dan mengurus. Dengan demikian, dominasi kekuatan militer itu hanya berhenti pada tataran menguasai (rulling). Dalam hal ini rulling juga bisa dipahami sebagai kondisi yang tidak menjadi pemerintah dalam artian tidak mengatur dan mengurus.

Ada juga beberapa literatur yang menganggap bahwa antara rulling dan governing berbeda. Rulling bisa dilakukan oleh siapapun. Rulling mempunyai makna menguasai dan mempunyai unsur dominasi. Sementara itu, secara ideal normatif, governing melekat pada pemerintah dan mempunyai otoritas dan menjadi sebuah legitimasi untuk menyelenggarakan pemerintahan. Dalam pengertian dasar, memerintah adalah penggunaan otoritas politik yang dipegang oleh pemerintah.

Governing diartikan sebagai sebuah kata kerja yang memerintah dimana kata memerintah tidak lazim digunakan dalam kosakata pemerintahan. Kata yang lazim digunakan dalam pemerintahan adalah menyelenggarakan pemerintahan.

Menyelenggarakan pemerintahan berarti ada otoritas yang mengatur dan mengurus. Otoritas tersebut adalah tradisi atau pengaruh dari Belanda yang sangat kuat, yakni mengatur dan mengurus di mana perbuatan hukum dan administrasi mengabaikan perbuatan politik. Governing memiliki padanan kata yang banyak sehingga sulit untuk dipahami, tetapi dalam pengertian bahasa Indonesia kata baku dari governing adalah mengatur dan mengurus. Padanan kata governing dalam keilmuan perlu dilakukan sebuah perbandingan dimana perlu dibandingkan dengan konsep-konsep kunci yang harus diadaptasi, misalnya: konsep *rulling* (menguasai), konsep governing (mengatur dan mengurus), konsep o*rdering* (menata atau menciptakan) dan konsep *stiring* (mengarahkan).

Para ilmuwan politik lebih menyukai rulling dari pada governing misalnya ilmuwan Amerika Serikat seperti Robert Dahl. Dahl sebagai ilmuwan politik, tetapi kajiannya lebih dekat dengan politik dalam pengertian pemerintahan, yang pada, yang pada tahun 1961 menulis "*Who Govern*" atau "siapa yang memerintah". Dahl berbicara pada otoritas atau pada kewenangan politik yang sudah dilembagakan dalam institusi pemerintahan. William Damhoff (1967) lebih menyukai konsep Rule yang dalam bukunya menulis "*Who Rule*" (siapa yang menguasai). Ia memiliki perspektif keluar dari institusi pemerintahan, tetapi perlu diperhatikan bahwa ada kekuatan diluar institusi pemerintahan.

Konsep governing yang dipahami sebagai upaya untuk mengatur dan mengurus harus memiliki proses, fungsi dan hasil. Governing mengandung proses politik, hukum dan administrasi. Pembentukan hukum dan kebijakan adalah perbuatan penting pemerintah dalam governing. Gagasan ideal dalam konteks ini adalah fungsi

ekstraksi, distribusi, proteksi dan koersi yang dijalankan pemerintah atas negara, warga dan masyarakat.

Fokus utama governing sebagai basis konsep identitas mengandung proses politik, hukum dan administrasi. Sebab politik adalah sebuah kegiatan membuat keputusan dan hukum dan administrasi adalah sebagai bentuk teknis eksekusi dari hukum atau keputusan tersebut. Membicarakan konsep governing tidak terlepas dari Kebijakan adalah tindakan utama pemerintah fungsi pemerintahan adalah protecting atau melindungi bukan hanya promoting. Fungsi memerintah yang dijalankan pemerintah yang paling utama adalah *protecting* untuk *law* and *order* serta *distributing* untuk *welfare* (kesejahteraan). Pemerintahan mencakup proses politik, hukum, dan administrasi yang didukung dengan teknik. Pemerintahan juga mencakup proses *connecting*, *crafting* dan *transforming* terhadap unsur-unsur berbeda untuk melahirkan kebijakan, hukum, dan lain sebagainya.

Kebijakan merupakan jantung pemerintahan dan perbuatan pemerintah dalam memerintah dan dalam Ilmu Pemerintahan berbicara kebijakan dari hulu sampai hilir serta secara komprehensif berbicara konteks, kontestasi, konstitutif, konten, konsistensi, dan konsekuensi. Bahkan bisa juga bicara soal kontradiksi kebijakan. Governing adalah arena kontestasi sehingga dibutuhkan pemerintah yang kuat, berdaulat dan demokratis dan tidak diintervensi oleh elit, dan pihak lainnya tetapi lebih tegak lurus dan secara responsible mempertanggungjawabkan fungsi perlindungan (protecting) dan pendistribusian (distributing) untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat (Sutoro Eko, 2021: 12-14).

Dalam kaitannya dengan konsep governing ini, maka perbuatan pemerintah Kalurahan Caturtunggal dalam memperkuat ketahanan sosial desa melalui konsolidasi kaum muda, dapat dilakukan melalui:

1) *Governing* (Mengatur dan Mengurus)

Desa yang memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat dan berperan dalam mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kukuh dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang kuat, adil dan sejahtera.

Mengatur dan mengurus yang dimaksud dalam konteks ini adalah peran pemerintah kalurahan mengakomodasi kebutuhan dan demand (tuntutan) dari Karang Taruna dengan menyesuaikan potensi yang ada. Berdasarkan realitas, terdapat karang taruna kalurahan Caturtunggal dan sub-unit Karang Taruna yang tersebar di beberapa padukuhan termasuk di Padukuhan Nologaten. Sebagai aktor yang memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan (policy making) maka upaya yang dapat dilakukan adalah dengan mengkonsolidasi atau menyatukan visi misi karang taruna agar tidak bergerak sendiri serta melakukan penguatan yang tepat melalui pembinaan dan pemberdayaan seperti yang diamanatkan oleh UU Desa Nomor 6 Tahun 2014.

Dalam penyusunan RPJMDes yang merupakan master plan desa dalam 6 tahun masa jabatan, ruang tersebut dapat digunakan oleh Karang Taruna sebagai panggung demokrasi untuk memberikan gagasan, identifikasi masalah dan potensi karang taruna yang dapat memberikan informasi dan konsep ideal tentang pengembangan sumber daya manusia di desa terkhusus pembinaan pemuda.

Dukungan yang dapat diberikan kepada Karang Taruna adalah memberikan legal formal atau kepengaturan yang jelas dalam RPJMdes yang dinaungi oleh Peraturan Desa ataupun ditetapkan sebagai mitra pembangunan desa dengan memberikan dukungan dana yang jelas dan dapat diakses secara merata melalui APBdes.

2) *Ordering* (menata atau menciptakan)

Salah satu point dalam studi governing adalah ordering yaitu sebuah proses penataan dan penciptaan. Tersebarnya beberapa unit karang taruna di beberapa padukuhan tentu tidak menjamin adanya pemerataan yang baik, sehingga diperlukan penataan unit-unit karang taruna agar tidak terjadi polarisasi, diskriminasi ataupun kecemburuan sosial. Oleh karena itu inovasi dari Pemerintah Kalurahan sangat diperlukan agar tidak adanya kompetisi yang tidak sehat antar-karang taruna dengan menciptakan ruang komunikasi antar unit karang taruna dan memberikan kesempatan belajar yang luas untuk pengembangan potensi diri dan kemajuan organisasi.

3) *Stiring* (mengarahkan)

Sebagai organisasi kepemudaan yang memiliki tanggung jawab sosial meliputi mengantisipasi, mencegah dan menangkal berbagai masalah sosial serta memiliki peluang untuk berkreasi, berinovasi dan memberikan perubahan yang baik, maka penting adanya pengarahan yang jelas, substantif dan memiliki manfaat berkelanjutan bagi karang taruna dengan memberikan sosialisasi, pelatihan, bimbingan teknis, hingga pendampingan dalam pelaksanaan agar sistematika arahan dan capaian yang diharapkan dapat memberikan output dan outcome bagi karang taruna maupun masyarakat.

F. Fokus Penelitian

Fokus penelitian bermanfaat bagi pembatasan mengenai obyek penelitian yang diangkat. Manfaat lainnya adalah agar peneliti tidak terjebak pada banyaknya data yang diperoleh di lapangan. Penentuan fokus penelitian lebih diarahkan pada tingkat kebaruan informasi yang akan diperoleh dari situasi perekonomian dan sosial ini dimaksudkan untuk membatasi studi kualitatif sekaligus membatasi penelitian guna memilih data yang relevan dan yang tidak relevan.

Menurut Sugiyono (2017: 207), pembatasan dalam penelitian kualitatif lebih didasarkan pada tingkat kepentingan, urgensi dan reliabilitas masalah yang akan dipecahkan. Fokus penelitian ini meliputi:

1) Kebijakan Pemerintah Desa Caturtunggal dalam Konteks Pembinaan dan Pemberdayaan Karang Taruna di Kaluruhan;

2) Relasi Pemerintah Desa, Karang Taruna Padukuhan dan Masyarakat Padukuhan Nologaten;
3) Tanggapan Karang Taruna dalam Program Pembangunan Masyarakat;
4) Dinamika Karang Taruna dalam Memperkuat Ketahanan Sosial Desa baik Sebelum Pandemi Maupun Pada Saat Pandemi;
5) Urgensi Pembinaan Karang Taruna di Padukuhan Nologaten;
6) Kendala-kendala dan menjalankan konsolidasi Kaum oleh Pemerintah Desa dan Memperkuat Ketahanan Sosial Desa.

G. Metode Penelitian

Metode Penelitian adalah cara ilmiah yang dilakukan untuk mendapatkan data dengan tujuan tertentu (Lasa, 2009:7). Kata ilmiah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna bersifat keilmuan atau memenuhi syarat (kaidah) ilmu sehingga dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Deskriptif adalah suatu pendekatan dalam meneliti status kelompok manusia, obyek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Sedangkan kualitatif menurut Taylor dan Bogdan adalah suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dari orang dan perilaku yang diamati. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pendekatan deskriptif kualitatif adalah suatu pendekatan yang menggambarkan keadaan suatu status fenomena yang

terjadi dengan kata-kata atau kalimat kemudian dipisah-pisahkan menurut kategori untuk mendapatkan kesimpulan

Sedangkan Soerjono Soekanto berpendapat bahwa penelitian deskriptif kualitatif adalah prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan suatu subyek atau obyek panel (seseorang, lembaga, masyarakat, dan lain-lain) kemudian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak sebagai obyek.

2. Unit Analisis

Secara fundamental unit analisis berkaitan dengan masalah penentuan apa yang dimaksud dengan kasus dalam penelitian. Atau dalam definisi lain, unit analisis adalah satuan tertentu yang diperhitungkan sebagai subjek atau sasaran penelitian (sasaran yang dijadikan analisis atau fokus yang diteliti). Unit analisis suatu penelitian dapat berupa benda, individu, kelompok, wilayah dan waktu tertentu sesuai dengan fokus penelitiannya. Adapun unit analisis dalam penelitian ini, yaitu:

a) Obyek Penelitian

Obyek penelitian adalah hal yang menjadi sasaran penelitian (Kamus Bahasa Indonesia, 1989: 6 22). Menurut Supranto (2000: 1) obyek penelitian adalah himpunan elemen yang dapat berupa orang, organisasi atau barang yang akan diteliti. Tujuan dari obyek penelitian ini adalah untuk mendapatkan data yang obyektif, valid, dan reliabel tentang suatu hal. Kemudian dipertegas oleh (Dayan, 1986: 21) obyek penelitian adalah pokok persoalan yang akan diteliti untuk mendapatkan data secara lebih terarah. Adapun obyek penelitian dalam

tulisan ini adalah Konsolidasi Kaum Muda Dalam Memperkuat Ketahanan Sosial Desa.

b) Subyek Penelitian

Yang dimaksudkan dengan subyek penelitian adalah orang, tempat atau benda yang diamati dalam rangka pembumbutan sebagai sasaran (Kamus Bahasa Indonesia, 1989: 862) atau dengan definisi lain subyek penelitian merupakan keseluruhan dari sumber informasi yang dapat memberikan data sesuai dengan masalah yang diteliti. Subyek dalam penelitian ini adalah Kepala Lurah, Badan Permusyawaratan Desa, Anggota Karang Taruna dan Masyarakat Padukuhan Nologaten.

Informan adalah orang yang bisa memberi informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Teknik penentuan informan yang digunakan oleh peneliti adalah menggunakan teknik purposive, yaitu teknik pengambilan informan yang didasarkan atas tujuan tertentu (orang yang betul-betul dipilih memiliki kriteria sebagai sampel). Informan ini dibutuhkan untuk mengetahui kondisi yang sesuai dengan obyek penelitian. Adapun informan dalam penelitian ini berjumlah 14 orang yang terdiri dari:

1) Sekretaris Kalurahan Caturtunggal;
2) Ketua Seksi Sosial Kalurahan Caturtunggal;
3) Anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan (BPKal) Kalurahan Caturtunggal;
4) Kepala Dukuh Nologaten;
5) Ketua Karang Taruna Kalurahan;
6) Ketua Karang Taruna Padukuhan

7) Pengurus dan Anggota Karang Taruna Padukuhan (3 orang); dan

8) Tokoh Masyarakat (3 Orang)

Tabel 1.1
Profil Subyek Penelitian

NO	NAMA	USIA (Tahun)	JABATAN
1	Aminudin Aziz	54	Sekretaris Kalurahan
2	Kirwanto	35	Ketua Seksi Sosial
3	Adik Prasetyo	40	Anggota BPKal
4	Sulistyo Eko Narmono	46	Ketua Dukuh Nologaten
5	Nurlistiana	21	Ketua Karang Taruna Padukuhan Nologaten
6	Abimanyu Mahendra	26	Wakil Ketua Karang Taruna Nologaten
7	Salma Fitri Adrianti	17	Sekretaris Karang Taruna Nologaten
8	Nazwa Amalia Putri	18	Bendahara 1 Karang Taruna Nologaten
9	Ealrymonna Avishara	16	Bendahara 2 Karang Taruna Nologaten
10	Damaniq Riski	28	Anggota Karang Taruna Padukuhan Nologaten
11	Hendo	28	Ketua Karang Taruna Kalurahan
12	Purwoko	47	Tokoh Masyarakat
13	Wahyu Hanani	46	Tokoh Masyarakat
14	Eko Pradiantoro	47	Tokoh Masyarakat

c) Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian dilakukan. Penetapan lokasi penelitian merupakan tahap yang sangat penting dalam penelitian kualitatif, karena dengan ditetapkannya lokasi penelitian ini berarti obyek dan tujuan sudah ditetapkan sehingga mempermudah penulis dalam melakukan penelitian. Lokasi ini bisa di wilayah tertentu atau suatu lembaga tertentu dalam masyarakat. untuk memperoleh data primer, lokasi penelitian dilakukan di Padukuhan Nologaten, Kalurahan Caturtunggal, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

3. Teknik Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan berbagai cara yang disesuaikan dengan informasi yang diinginkan, menurut Arikunto (2006: 221), antara lain dilakukan dengan:

a. Observasi (Pengamatan)

Observasi merupakan salah satu teknik dalam pengumpulan data yang sangat lazim dalam metode penelitian kualitatif. Sedangkan menurut Zainal Arifin (Kristanto, 2010) observasi adalah suatu proses yang didahului dengan pengamatan kemudian pencatatan yang bersifat sistematis, logis, obyektif, dan rasional terhadap macam fenomena dalam situasi yang sebenarnya maupun situasi buatan.

Metode observasi atau pengamatan adalah kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan panca indera. Kunci keberhasilan observasi

sebagai teknik pengumpulan sangat banyak ditentukan oleh pengamat sendiri sebab pengamat melihat, mendengar, mencium atau mendengarkan suatu obyek penelitian kemudian ia yang menyimpulkan dari apa yang diamati itu. Pengamat adalah kunci keberhasilan dan ketepatan hasil penelitian (Yusuf, 2014) karena kualitas penelitian ditentukan oleh seberapa jauh dan mendalam peneliti mengerti tentang situasi dan konteks dan mendeskripsikannya sealamiah mungkin (Semiawan,2010). Dari gejala-gejala yang ada, peneliti dapat mengambil kesimpulan umum dari gejala-gejala tersebut (Hasanah, 2017).

b. Wawancara Mendalam (Indepth Interview)

Wawancara adalah salah satu teknik yang digunakan dalam proses pengumpulan data secara sederhana dapat dikatakan bahwa wawancara (interview) adalah suatu kejadian atau proses interaksi antara pewawancara (interviewer) dan sumber informasi atau orang yang diwawancarai (Interviewee), melalui komunikasi langsung (Yusuf, 2010). Pada hakikatnya wawancara merupakan kegiatan untuk memperoleh informasi secara mendalam tentang sebuah isu atau tema yang diangkat dalam penelitian. Wawancara bertujuan untuk mencatat opini, perasaan, opini, emosi dan hal lain yang berkaitan dengan topik penelitian.

Teknis pelaksanaan wawancara dapat dilakukan secara sistematis atau tidak sistematis. Yang dimaksud secara sistematis adalah wawancara dilakukan dengan terlebih dahulu peneliti menyusun instrumen pedoman wawancara, disebut tidak sistematis apabila peneliti melakukan wawancara secara langsung tanpa terlebih dahulu menyusun pedoman wawancara.

Penelitian ini mengkombinasikan wawancara mendalam dengan wawancara terarah.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menelusuri data historis, dokumen tentang orang atau sekelompok orang, peristiwa atau kejadian dalam situasi sosial yang sangat berguna dalam penelitian kualitatif (Yusuf, 2014).

Teknik atau studi dokumentasi adalah cara pengumpulan data melalui peninggalan arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori, dalil-dalil atau hukum-hukum dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian. Dalam penelitian kualitatif teknik pengumpulan data yang utama karena pembuktian hipotesisnya yang diajukan secara logis dan rasional melalui pendapat teori atau hukum- hukum baik mendukung maupun menolak hipotesis tersebut

Data berupa dokumen meliputi surat, catatan harian, arsip, foto, cinderamata, jurnal kegiatan dan sebagainya. Peneliti perlu memiliki kepekaan teoritik untuk memaknai semua dokumen tersebut sehingga tidak hanya sekedar barang yang tidak bermakna.

d. Studi Pustaka (*Library Research)*

Studi pustaka merupakan langkah awal dalam metode pengumpulan data. Studi pustaka merupakan awal pengumpulan data yang diarahkan kepada pencarian data dan informasi melalui dokumen-dokumen baik dokumen

tertulis, foto-foto, gambar maupun dokumen elektronik yang dapat mendukung dalam proses penulisan. "Hasil penelitian akan kredibel apabila didukung foto atau karya tulis akademik atau seni yang telah ada" (Sugiyono, 2005:83).

Penelitian kepustakaan dilakukan sebagai usaha guna memperoleh data yang bersifat teori sebagai pembanding dengan data penelitian yang diperoleh. Data tersebut dapat diperoleh dari literature, catatan kuliah serta tulisan lain yang berhubungan dengan penelitian ini. Maka dapat dikatakan bahwa kredibilitas hasil penelitian dapat dipengaruhi oleh studi pustaka.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan menelaah data yang diperoleh dari berbagai sumber dan informasi. Menurut Sugiyono (2013), analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun oleh orang lain. Dengan demikian, data yang telah terkumpul dari hasil wawancara dan studi kepustakaan atau dokumentasi akan dianalisis dan ditafsirkan untuk mengetahui maksud serta maknanya, kemudian dihubungkan dengan masalah penelitian. Data yang terkumpul disajikan dalam bentuk narasi dan kutipan-kutipan langsung dari hasil wawancara.

Dalam pendekatan kualitatif, data diperoleh dari berbagai macam sumber dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam (triangulasi) dan

dilakukan secara terus-menerus sampai datanya jenuh. Analisis data kualitatif adalah bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan pola hubungan tertentu atau menjadi hipotesis.

Analisis data merupakan suatu langkah penting dalam penelitian, karena dapat memberikan makna terhadap data yang dikumpulkan oleh peneliti. Data yang diperoleh dan dikumpulkan dari informan melalui hasil observasi, wawancara, studi literatur dan dokumentasi di Lapangan. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui tiga kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

a) Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, mengorganisasi data sedemikian rupa sehingga diperoleh kesimpulan akhir. Reduksi data diartikan juga sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data dilakukan terus menerus selama penelitian berlangsung bahkan sebelum data-data terkumpul sudah mengantisipasi akan adanya reduksi data sudah tampak sewaktu memutuskan kerangka konseptual, wilayah penelitian, permasalahan penelitian dan penemuan metode pengumpulan data. Selama pengumpulan data berlangsung, sudah terjadi tahapan reduksi, selanjutnya (membuat ringkasan, mengkode, menelusuri tema, membuat gugus-gugus, menulis memo, dan lain-lain.) proses ini berlangsung sampai pasca pengumpulan

data di lapangan, bahkan pada akhir pembuatan laporan sehingga tersusun lengkap.

b) Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data (Data Display) dimaksudkan agar lebih mempermudah peneliti dalam melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari data penelitian. Hal ini merupakan pengorganisasian data ke dalam suatu bentuk tertentu sehingga terlihat jelas dan lebih utuh. Data-data tersebut kemudian dipilah-pilah dan disisihkan untuk disortir menurut kelompoknya dan disusun sesuai dengan kategori yang sejenis untuk ditampilkan agar selaras dengan permasalahan yang dihadapi, termasuk kesimpulan-kesimpulan sementara diperoleh pada waktu data direduksi. Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya. Hal ini mempermudah untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang dipahami.

c) Penarikan Kesimpulan

Pada penelitian kualitatif, verifikasi data dilakukan secara terus menerus sepanjang proses penelitian dilakukan. Sejak pertama memasuki lokasi penelitian dan selama proses pengumpulan data, peneliti berusaha untuk menganalisis dan mencari makna dari data yang dikumpulkan, yaitu mencari pola tema, hubungan persamaan, hipotesis dan selanjutnya dituangkan dalam bentuk kesimpulan yang masih bersifat tentatif. Dalam tahap ini penarikan kesimpulan dari kategori-kategori data yang telah

direduksi dan disajikan untuk selanjutnya menuju kesimpulan akhir mampu menjawab permasalahan yang dihadapi. Setiap kesimpulan data senantiasa akan terus dilakukan verifikasi selama penelitian berlangsung yang melibatkan interpretasi peneliti. Secara singkat makna muncul dari data yang telah teruji kepercayaannya, kekuatannya dan validitasnya (Emzir, 2016:133).

d) Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Keabsahan data atau validitas data adalah "Validity means truthful. It refers to the bridge between a construct and the data" (Neuman, dalam Herdiyansyah, 2010:190). Validitas merupakan suatu ukuran yang menunjukan tingkat kevalidan dari sebuah instrumen. Sebab instrumen dinyatakan valid apabila mampu mengukur apa yang diinginkan dan dapat mengungkapkan data dari variabel yang diteliti secara tepat (Arikunto,2010:211), Jadi dapat disimpulkan bahwa keabsahan data merupakan cara untuk mengetahui kebenaran data yang diperoleh melalui bermacam-macam teknik pengumpulan data untuk menunjukan tingkat kevalidan dari sebuah instrumen.

Ada beberapa cara untuk menguji validitas data dalam penelitian kualitatif, di antaranya:

1) Membandingkan hasil wawancara, hasil pengamatan, dan dokumen yang telah diperoleh;

2) Membandingkan pengakuan seorang informan secara pribadi dengan pernyataan-pernyataan di depan umum, atau pada saat dilangsungkan atau pada saat diskusi kelompok;
3) Membandingkan pendapat antara yang satu dengan yang lain pada saat dilakukan penelitian (sinkronis) dengan situasi yang pernah terjadi sepanjang sejarah (diakronis);
4) Membandingkan pendapat dari berbagai macam, seperti antara orang biasa, berpendidikan dan birokrat.

Validitas data penelitian kualitatif juga mengenal konsep triangulasi. Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu di luar data sebagai standar pembanding terhadap data tersebut

BAB II

GAMBARAN UMUM KALURAHAN CATURTUNGGAL, PADUKUHAN NOLOGATEN DAN KARANG TARUNA PADUKUHAN NOLOGATEN

A. Gambaran Umum Kalurahan Caturtunggal

1. Kondisi Geografis Kalurahan Caturtunggal.

   a. Letak dan Batas Wilayah

Kalurahan Caturtunggal termasuk wilayah administratif Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman, Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta. Wilayah Kalurahan Caturtunggal terletak di kawasan perkotaan yang berbatasan langsung dengan Kota Yogyakarta dan terdapat banyak jalan protokol, sehingga lalu lintas sangat ramai dan padat sekali. Kalurahan Caturtunggal menjadi daerah yang sangat kompleks dengan berbagai aktivitas, kawasan wilayah Desa Caturtunggal adalah kawasan trans-sosial antara wilayah perkotaan dengan pedesaan, dengan perkembangan komunitas pedagang, pengusaha maupun pencari kerja yang akseleratif sehingga terjadi peningkatan kebutuhan hidup di samping karakteristik sosial komunitas mahasiswa dari berbagai daerah yang beragam

Adapun letak dan batas wilayah Kalurahan Caturtunggal adalah sebagai berikut:

1) Batas Utara : Kalurahan Condongcatur, Kapanewon Depok Sleman
2) Batas Barat : Desa Sinduadi, Kecamatan Mlati Sleman, Kota Jogja.
3) Batas Timur : Kalurahan Maguwoharjo, Kepanewon Depok, Sleman.

4) Batas Selatan : Desa Banguntapan Kabupaten Bantul dan Kecamatan Gondokusuman, KotaYogyakarta.

Dari informasi dan data di atas, dapat disimpulkan bahwa letak Kalurahan Caturtunggal sangat strategis karena berbatasan langsung dengan dua Kabupaten Bantul dan Kota Yogyakarta. Letaknya yang strategis memungkinkan masyarakatnya untuk melakukan mobilitas sosial dengan mudah. Hal ini juga menjadi keuntungan tersendiri bagi Kalurahan Caturtunggal terutama dalam membangun kerjasama atau bermitra dengan Desa/Kalurahan tetangga dalam memajukan Kalurahan Catutunggal.

b. Orbitasi

Secara geografis letak Desa Caturtunggal terhadap pusat-pusat kota dan pemerintahan relatif dekat dan mudah terjangkau, selengkapnya sebagai berikut:

1. Jarak dari Kapanewon Depok : 1,5 KM
2. Jarak dari Kabupaten Sleman : 10 KM
3. Jarak dari Provinsi : 5 KM
4. Jarak dari Ibu kota Negara : 630 KM

Dari data di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam tingkat regional, akses pemerintah maupun masyarakat Kalurahan Caturtunggal terhadap pemerintahan suprakalurahan cukup mudah. Jarak tempuh masyarakat, baik ke Kapanewon Depok, Kabupaten Slema, dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tidak terlalu memakan waktu dan biaya yang banyak. Hal ini memudahkan pemerintah

maupun masyarakat Kalurahan Caturtunggal dalam mengurus berbagai hal yang berkaitan dengan pembangunan Kalurahan Caturtunggal dan membangun sinergitas dengan pihak suprakalurahan.

c. Pembagian Wilayah Kalurahan Caturtunggal

Pembagian Wilayah Kalurahan Caturtunggal terdiri dari 20 Padukuhan, 93 RW dan 296 RT. Wilayah Padukuhan serta dukuh Kalurahan Caturtunggal adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1

Padukuhan dan Dukuh Kalurahan Caturtunggal

No	Padukuhan	Dukuh
1	Manggung	Dwi Budiyanto
2	Karangwuni	Sarwiyono
3	Kocoran	Heru Mustafa
4	Blimbingsari	Robert Purnomo
5	Sagan	Sih Sugiarti
6	Samirono	Muh. Dimyati
7	Karangmalang	Sudarman, A. Md
8	Karanggayam	Priyanto, BA
9	Mrican	Sumarji

10	Santren	Yanuar Eko Hartanto, SE.
11	Papringan	Nur hamid, S. Ag
12	Ambarukmo	H. Pujo Wiratno (Plt)
13	Gowok	H. Pujo Wiratno
14	Nologaten	Sulistyo Eko A. Md
15	Tempel	Masijan
16	Janti	Heri Sugiyarto, A. Md
17	Ngentak	Rubimin
18	Tambakbayan	Widodo DM
19	Kledokan	Supriyono
20	Seturan	Mada Ferdian Sumedi

(Sumber: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Caturtunggal 2021-2026)

2. Keadaan Demografis

Masyarakat Kalurahan Caturtunggal merupakan masyarakat Sosio Cultural yang terdiri dari berbagai suku bangsa di Wilayah Negara Kesatuan Negara Republik Indonesia dengan total sekitar 51 ribu jiwa. Berikut data penduduk pada Januari Tahun 2021 yaitu:

a. Jumlah Penduduk : 46.133jiwa

b. Jumlah Laki-laki : 22.900 Jiwa

c. Jumlah Perempuan : 23. 233 Jiwa.

Data di atas menunjukan bahwa jumlah penduduk Kalurahan Caturtunggal didominasi oleh penduduk berjenis kelamin perempuan dengan jumlah 23.233 jiwa. Sedangkan penduduk yang berjenis kelamin laki-laki berjumlah 22.900 jiwa. Dari

data di atas juga dapat diketahui bahwa jumlah penduduk antara perempuan dan laki-laki tidak terlalu terpaut jauh. Hal inilah yang dapat menjadi indikator keterlibatan semua pihak dalam mengakses banyak hal, dan perolehan kesempatan.

Dalam klasifikasi data penduduk Kalurahan Caturtunggal berdasarkan mata pencaharian adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2

Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Pekerjaan

No	Mata pencaharian	Jumlah
1.	Buruh Tani	332 jiwa
2.	Karyawan	1.387 jiwa
3.	Pegawai Negeri	4.523 jiwa
4.	Petani	459 jiwa
5.	Pengrajin	325 jiwa
6.	Pensiunan	2.564 jiwa
7.	Pengelola Jasa	1.573 jiwa
8.	TNI/POLRI	905 jiwa
9.	Wiraswasta	2.073 jiwa

(Sumber: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Caturtunggal 2021-2026)

Dari data diatas, dapat disimpulkan bahwa dari segi mata pencaharian, Kalurahan Caturtunggal didominasi oleh masyarakat yang berprofesi sebagai Pegawai Negeri dengan jumlah 4.523 jiwa, dan yang mendominasi kedua adalah masyarakat yang bermata

pencaharian sebagai Wiraswasta dengan total 2. 073 jiwa, sedangkan untuk masyarakat dengan mata pencaharian sebagai petani adalah sekitar 459 jiwa dan jumlah yang terkecil dari persentasi mata pencaharian masyarakat Kalurahan Caturtunggal adalah yang bermata pencaharian sebagai buruh tani yaitu hanya 332 jiwa. Hal ini tentu menjadi gambaran bahwa Kalurahan Caturtunggal sendiri telah menjadi Kalurahan (secara administratif) yang telah mengkota (urban) sebab komposisi masyarakat yang bekerja disektor jasa dan industri, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan masyarakat yang bekerja di sektor pertanian.

3. Kondisi Pemerintahan Kalurahan Caturtunggal

a) Struktur Pemerintah Kalurahan adalah sebagai berikut:

1. Kepala Desa /Lurah : Agus Santoso, S.Psi
2. Sekretaris Desa (Carik) : Aminudin Aziz, S.Si
3. Kepala Seksi Pembangunan (Jagabaya) : Andy Sofyan, M.Pd
4. Kepala Seksi Pemerintahan (Pangripta) : M. Romadhon Fajrul, F, A.Md.T.
5. Kepala Seksi Pelayanan Sosial (Kamituwa) : Kirwanto
6. Kepala Urusan Keuangan (Danarta) : Drs.H. Sunarjo, M.Phil
7. Kepala Urusan TU dan Umum (Tata Laksana) : Bambang Harjati Susetyo.
8. Kepala Urusan Perencanaan (Ulu-Ulu) : Andi Suwarno, S.IP

b) Staf Perangkat Kalurahan

1. Marsudi, S. IP
2. Yunika Rina Wati A. Md
3. Nia Astuti, S. IP
4. Sunu Agung Adi C, ST
5. Hidayat Nur Adi Hutomo, ST
6. Afik Kurniawan L, S. Psi
7. Apriliana, SE
8. Suratman
9. Sugimin
10. Fuad Nur Cahyo, S. Pd
11. Danang Prasetio, S. Si
12. H. Kusmono
13. Devia Nurul Meilani, SE
14. Irfan Fatoni Pranajaya, S. Kom
15. Irma Wulandari, A.Md
16. Meirani Damastiti, S.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Kalurahan, maka yang semula Desa Caturtunggal kemudian menjadi Kalurahan Caturtunggal. Hal yang sama juga berlaku untuk sebutan pemimpin. Pemimpin kalurahan disebut dengan istilah Lurah Kalurahan. Saat ini, Lurah Kalurahan Caturtunggal dipimpin oleh Bapak Agus Santoso. Dalam menjalankan tugasnya sebagai Lurah, Bapak Agus Santoso dibantu oleh Pamong (perangkat) Kalurahan Caturtunggal.

Jika susunan keorganisasian Pemerintah Kalurahan di atas dari perspektif gender, maka dapat diketahui bahwa susunan kepemerintahan Kalurahan Caturtunggal sudah tidak mengalami bias gender. Sebab kaum perempuan turut diberi tempat dalam

susunan keorganisasian Pemerintah Kalurahan Caturtunggal. Terkait latar pendidikan, hampir sebagian besar Pamong Kalurahan Caturtunggal bergelar sarjana dengan spesifikasi bidang yang bervariasi. Hal ini tentu dapat berpengaruh pada pelayanan Kalurahan Caturtunggal terhadap masyarakat Kalurahan Caturtunggal pada umumnya.

B. Gambaran Umum Padukuhan Nologaten

1. Keadaan Geografis

a. Letak dan Batas Wilayah

Padukuhan Nologaten adalah salah satu padukuhan yang terletak di Kalurahan Caturtunggal, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Luas wilayah Padukuhan Nologaten adalah 48,5 Ha yang terdiri dari 10 RT dan 4 RW. Secara geografis Padukuhan Nologaten terletak di daerah perbatasan yaitu wilayah Kabupaten Sleman dengan wilayah Kota Yogyakarta. Batas wilayah Padukuhan Nologaten, Kalurahan Caturtunggal, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman terdiri dari:

1) Utara : Padukuhan Dadag, Kalurahan Condongcatur
2) Selatan : Padukuhan Ambarukmo
3) Barat : Padukuhan Papringan, Kalurahan Condongcatur
4) Timur : Padukuhan Tempel

Dari data di atas, dapat disimpulkan bahwa sebelah utara Padukuhan Nologaten, berbatasan dengan padukuhan Dadag, Desa Condongcatur, sebelah selatan berbatasan dengan padukuhan Ambarukmo, sebelah barat berbatasan

dengan padukuhan Tempel dan sebelah timur berbatasan dengan Padukuhan Tempel.

b. Orbitasi

Jarak dari Padukuhan Nologaten ke pusat Kabupaten Sleman yaitu:

1. Jarak dari Padukuhan Nologaten ke Kantor Kalurahan Caturtunggal adalah 1,3 km;
2. Jarak dari Padukuhan Nologaten ke kantor Kapanewon Depok adalah 3,1 km; dan
3. Jarak dari Padukuhan Nologaten ke kantor Kabupaten Sleman adalah 11 km.

Dari data di atas, dapat disimpulkan bahwa letak Padukuhan Nologaten terbilang sangat dekat dengan Kantor Kalurahan Caturtunggal. Sebab jarak antara Padukuhan Nologaten dengan Kantor Kalurahan Caturtunggal hanya sekitar 1,3 km. Keadaan ini memudahkan masyarakat Padukuhan Nologaten dalam mengurus segala hal yang dibutuhkan. Sedangkan jarak antara Padukuhan Nologaten dengan Kantor Kapanewon Depok adalah sekita 3,1 km dan jarak antara Padukuhan Nologaten dengan Kabupaten Sleman adalah sekitar 11 km.

2. Kondisi Demografis

a. Jumlah Penduduk

Jumlah seluruh penduduk di Padukuhan Nologaten sebanyak 1.752 jiwa. Berikut adalah tabel jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin.

Tabel 2.3

Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah (Jiwa)	Persentase (%)
1	Laki-laki	869	49.6
2	Perempuan	883	50.4
Jumlah		1.752	100

(Sumber: Profil Padukuhan Nologaten Tahun 2021)

Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa Padukuhan Nologaten didominasi oleh penduduk yang berjenis kelamin perempuan. Penduduk berjenis kelamin perempuan berjumlah 883 jiwa dengan persentasi 50,5 %. Sedangkan penduduk berjenis kelamin laki-laki berjumlah 869 jiwa dengan persentase sekitar 49,6%. Jumlah penduduk laki dan perempuan dapat dikatakan hampir berimbang. Meskipun demikian, kita masih mendapat gambaran kuantitas perempuan lebih tinggi dibanding laki-laki. Dengan kalimat lain, penduduk Padukuhan Nologaten didominasi oleh penduduk yang berjenis kelamin perempuan.

Akan tetapi, kuantitas tidak selalu berbanding lurus dengan kualitas. Artinya, meskipun secara kuantitas, penduduk berjenis kelamin perempuan mendominasi penduduk berjenis kelamin laki-laki, itu tidak menjamin kualitas perempuan. Hal ini terjadi karena dalam banyak hal, perempuan masih tertinggal jauh dari laki-laki. Misalnya, perempuan seringkali mengalami keterbatasan dalam mengakses pendidikan, mengembangkan keterampilan, maupun memperoleh

kesempatan kerja. Semua keterbatasan yang ada pada perempuan sebetulnya berangkat dari akar persoalan yang sama yaitu budaya patriarki yang telah mengakar dalam kehidupan masyarakat Indonesia.

Eksistensi perempuan di era sekarang ini sudah mulai diperhitungkan di banyak ranah, karena perempuan dapat dikatakan memiliki kapasitas dan kapabilitas dalam banyak segi, baik itu kualitas cara berpikir dan berintelektual maupun keterampilan. Seperti halnya dalam keorganisasian Karang Taruna dimana kepengurusan Karang Taruna diketuai oleh perempuan yang dimana representasi kaum wanita diberikan peluang dan kepercayaan untuk memegang tampuk jabatan yang tinggi dalam keorganisasian dan tidak meremehkan eksistensi perempuan.

b. Jumlah Penduduk Berdasarkan RT

Padukuhan Nologaten mempunyai 10 Rukun Tetangga (RT). Berikut adalah tabel jumlah penduduk berdasarkan Rukun Tetangga.

Tabel 2.4

Jumlah Penduduk Berdasarkan Rukun Tetangga (RT)

No	Rukun Tetangga	Jumlah Warga	Persentase (%)
1	RT 01	153	8.73
2	RT 02	124	7.07
3	RT 03	43	2.45
4	RT 04	235	13.41
5	RT 05	188	10.73
6	RT 06	165	9.41

7	RT 07	405	23.11
8	RT 08	136	7.76
9	RT 09	175	9.98
10	RT 10	128	7.30
Jumlah		1.752	100

(*Sumber: Profil Padukuhan Nologaten Tahun 2021)*

Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa penduduk Padukuhan Nologaten berjumlah 1.752 jiwa. Penduduk Padukuhan Nologaten tersebar di 10 RT. Mayoritas penduduk Padukuhan Nologaten berdomisili di RT 07 yang mana penduduknya berjumlah 405 jiwa (23.11%). Sedangkan minoritas penduduk Padukuhan Nologaten berdomisili di RT 03 yang mana penduduknya hanya berjumlah 43 jiwa (2.45 %).

Dengan persebaran penduduk Padukuhan Nologaten tersebut. Pemuda setiap RT berupaya dihimpun dalam organisasi Karang Taruna dan sebagaimana yang telah disampaikan bahwa Organisasi Karang Taruna adalah wadah yang digunakan sebagai tempat berkumpulnya pemuda- pemuda Padukuhan Nologaten, maka setiap RW yang memiliki pemuda dalam kewilayahan akan terorganisir dalam Karang Taruna Padukuhan Nologaten. Masing-masing RT pada dasarnya memiliki ciri khas wilayahnya masing-masing, sehingga karakteristik tersebutlah yang dimiliki oleh Pemuda setiap RT tersebut. Namun perbedaan tersebut tidaklah menjadi persoalan bagi Pemuda dalam keorganisasian Karang Taruna untuk melakukan kegiatan bersama.

c. Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Pendidikan merupakan hal yang sangat penting untuk bisa menjalani kehidupan yang layak dan bisa memperbaiki perekonomian. Pendidikan masyarakat di Padukuhan Nologaten tergolong maju. Hal ini dapat dilihat dari fakta bahwa masyarakat mengenyam pendidikan mulai dari tingkat Sekolah Dasar/Sederajat sampai tingkat perguruan tinggi (diploma dan sarjana). Berikut adalah tabel jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan.

Tabel 2.5

Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase (%)
1	SD/Sederajat	156	8.90
2	SLTP/Sederajat	206	11.75
3	SLTA/Sederajat	570	32.53
4	Diploma 1	5	00.28
5	Diploma 2	6	00.34
6	Diploma 3	65	3.71
7	Strata 1	308	17.57
8	Strata 2	32	1.82
9	Strata 3	4	00.22
10	Belum Tamat SD	222	12.67
11	Tidak/Belum Sekolah	178	10.15
Jumlah		1.752	100

(Sumber: Profil Padukuhan Nologaten Tahun 2021)

Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa tingkat pendidikan masyarakat di Padukuhan Nologaten boleh dibilang cukup baik. Tingkat pendidikan masyarakat di Padukuhan Nologaten tergolong maju. Hal ini ditunjukkan dengan kenyataan bahwa penduduknya mampu mengakses pendidikan dari berbagai tingkatan mulai dari tingkat Sekolah Dasar sampai dengan tingkat Strata 3. Mayoritas penduduk Padukuhan Nologaten pernah mengenyam pendidikan sampai di tingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Atas/Sederajat. Hal ini menunjukkan bahwa sumber daya manusia di Padukuhan Nologaten cukup memadai. Sumber daya manusia yang memadai ini sebetulnya merupakan potensi penting untuk terus menggerakkan perubahan di Padukuhan Nologaten. Artinya, jika potensi sumber daya manusia digunakan dan dikelola dengan baik, maka cita-cita menjadikan Padukuhan Nologaten sebagai entitas yang mandiri, kuat, dan demokratis merupakan suatu keniscayaan. Dengan memanfaatkan sumber daya manusia yang memadai ini, maka terobosan-terobosan dan ide-ide konstruktif untuk membangun padukuhan dapat diimplementasikan dengan maksimal.

Meskipun demikian, Padukuhan Nologaten juga diharapkan untuk terus mendorong masyarakatnya untuk mengakses pendidikan sehingga mereka dapat meningkatkan kualitas hidupnya. Strategi yang dapat dilakukan oleh Padukuhan Nologaten adalah membuka akses kepada masyarakat untuk menikmati pendidikan entah itu pendidikan formal, pendidikan informal, maupun pendidikan non-formal. Hal ini sangat penting dilakukan mengingat di Padukuhan Nologaten terdapat 222 jiwa atau sekitar 12.67% masyarakat yang

belum menamatkan pendidikan di tingkat Sekolah Dasar. Selain itu, terdapat 178 jiwa atau sekitar 10.15% masyarakat tidak/belum mengenyam pendidikan.

Dari data jenis pekerjaan di atas, usia yang belum produktif tersebut, menghasilkan angka burden dependency ratio atau angka rasio ketergantungan jika dikaitkan dengan eksistensi organisasi Pemuda sebagai wadah kegiatan edukasi, rekreatif maupun produktif maka sudah sepatutnya Karang Taruna Padukuhan Nologaten memberikan akses kepada angkatan dengan usia belum produktif ini dalam mengembangkan pengetahuan dan wawasan, seperti dengan memanfaatkan perpustakaan cinarito yang dimiliki oleh Padukuhan Nologaten serta menginisiasi pelatihan-pelatihan untuk mengasah keterampilan. Sebagai Wadah Produktif melalui kegiatan pengelolaan usaha bersama seperti optimalisasi bakat menggambar yang dimiliki pemuda-pemuda setempat, keterampilan membudidaya ikan, menggalang dana melalui kolektivitas mencuci motor dan kegiatan-kegiatan produktif lainnya. Sebagai wadah rekreatif adalah Karang Taruna Padukuhan Nologaten dapat digunakan sebagai wadah untuk melakukan kegiatan yang bersifat rekreatif seperti berolahraga bersama, atau sekadar berkumpul bersama untuk mempererat relasi antar pemuda di Nologaten. Sebab realisasi dari tugas pokok dan fungsi ini turut membantu Padukuhan dalam mencapai ketahanan sosial ditengah era digitalisasi yang semakin berkembang pesat serta membantu Kalurahan dalam memberikan pelayanan sosial kepada masyarakat di ranah padukuhan.

d. Keadaan Ekonomi

Keadaan perekonomian dapat dilihat dari jenis pekerjaan atau mata pencaharian yang dilakukan masyarakat. Berikut adalah tabel keadaan ekonomi masyarakat berdasarkan jenis pekerjaan.

Tabel 2.6

Penduduk Berdasarkan Jenis Pekerjaan

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah (Jiwa)	Persentase (%)
1	Belum Bekerja	328	18.72
2	Buruh Harian Lepas	39	2.22
3	Buruh Tani	7	00.39
4	Dokter	4	0.22
5	Dosen	22	1.25
6	Guru	16	00.91
7	Juru Masak	1	00.57
8	Karyawan BUMN	11	00.62
9	Karyawan Honorer	8	00.45
10	Karyawan Swasta	364	20.77
11	Mekanik	2	00.11
12	Notaris	1	00.57
13	Pedagang	18	1.02
14	Pegawai Negeri Sipil	49	2.79

15	Pekerjaan Lainnya	4	00.22
16	Pembantu Rumah Tangga	2	00.11
17	Perajin	1	00.57
18	Perawat	2	00.11
19	Pelajar /Mahasiswa	49	2.79
20	Perangkat Desa	2	00.11
21	Pensiunan	52	2.96
22	Peternak	1	00.57
23	Pengacara	3	00.17
24	Petani	5	00.28
25	Polri	7	00.39
26	Sopir	3	00.17
27	Tukang Batu	3	00.17
28	Tukang Jahit	3	00.17
29	Tukang Kayu	1	00.57
30	Tukang Sol Sepatu	2	00.11
31	TNI	5	00.28
32	TNI AU	1	00.57
33	Wartawan	1	00.57
34	Wiraswasta	158	9.01
35	Wirausaha	2	00.11
Jumlah		1.752	10 0

(Sumber: Profil Padukuhan Nologaten Tahun 2021)

Tabel di atas menunjukkan bahwa mata pencaharian penduduk sangat bervariasi. Mata pencaharian yang bervariasi ini mengindikasikan bahwa Padukuhan Nologaten merupakan padukuhan sub-urban yang berada di Kalurahan Caturtunggal, Kabupaten Sleman. Mayoritas penduduk Padukuhan Nologaten bekerja sebagai karyawan swasta yaitu berjumlah 364 jiwa (20.77%). Meskipun demikian, angka pengangguran di Padukuhan Nologaten terbilang masih tinggi yaitu sekitar 18.72%. Tingginya angka pengangguran di Padukuhan Nologaten tentu membutuhkan respon dari berbagai elemen masyarakat. Lazimnya, pengangguran merupakan persoalan yang selalu menghantui kaum muda. Ada berbagai hal yang membuat kaum muda terjebak dalam pengangguran, misalnya, sedikitnya kesempatan kerja, lemahnya sumber daya manusia, maupun ketiadaan akses terhadap sumber daya publik. Oleh karena itu, sebagai wadah pengembangan generasi muda, maka Karang Taruna mesti menjadi pelopor atau penggerak untuk mengatasi persoalan yang ada dalam diri kaum muda.

Karang Taruna perlu merespon persoalan pengangguran karena Karang Taruna merupakan suatu organisasi sosial yang berfungsi untuk melaksanakan usaha kesejahteraan sosial bagi masyarakat. Selain itu, respon terhadap persoalan pengangguran ini merupakan upaya untuk menciptakan dan menumbuhkembangkan kesadaran Karang Taruna terhadap keadaan atau permasalahan yang ada di lingkungannya. Dengan kalimat lain, Karang Taruna mempunyai tanggung jawab sosial untuk menangani permasalahan yang ada.

Dalam rangka untuk mengatasi persoalan pengangguran di Padukuhan Nologaten, Karang Taruna dapat menyelenggarakan berbagai kegiatan atau

upaya untuk meningkatkan dan mengembangkan cipta, rasa, karsa, dan karya generasi muda. Artinya, Karang Taruna menjadi wadah yang mendorong pengembangan sumber daya manusia pada kaum muda. Selain itu, Karang Taruna dapat menjadi fasilitator bagi kaum muda untuk memperoleh akses kepada sumber daya publik. Akses terhadap sumber daya merupakan salah satu bagian dari upaya penguatan kaum muda. Dengan adanya akses terhadap sumber daya publik (modal maupun lahan serta sumber daya publik lainnya), maka persoalan pengangguran yang terjadi pada kaum muda maupun masyarakat secara umum. Dengan modal, misalnya, kaum muda dapat menciptakan suatu karya atau usaha yang dapat meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup.

e. Keadaan Sosial

Padukuhan Nologaten terletak di daerah perkotaan. Kehidupan di Padukuhan Nologaten tidak terlepas dari interaksi masyarakat sekitar. Masyarakat di Nologaten masih kental dengan gotong royong, kerja bakti, serta jadwal ronda. Berikut adalah tabel organisasi kemasyarakatan di PadukuhanNologaten.

Tabel 2.7

Organisasi Kemasyarakatan

No	Nama Organisasi	Status	Jumlah
1	KKLPMD	Aktif	1
2	BPD	Aktif	1
3	PKK	Aktif	1
4	Dasawisma	Aktif	4
5	Karang Taruna	Aktif	1
6	Posyandu	Aktif	4
Total			12

(Sumber: Profil Padukuhan Nologaten Tahun 2021)

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa kegiatan sosial kemasyarakatan masih berjalan dengan baik. Akan tetapi, pada masa pandemi ini, kegiatan sosial kemasyarakatan jarang dilakukan secara tatap muka (secara langsung). Hal ini terjadi karena ketakutan masyarakat akan bahaya dari pandemi Covid-19. Selain itu, pertemuan tatap muka secara langsung jarang dilakukan demi menjaga kesehatan untuk masyarakat sendiri. Sebagai contoh, selama pandemi Covid-19, kegiatan posyandu dilakukan dengan cara petugas posyandu melakukan kunjungan dari rumah ke rumah. Meskipun lebih banyak mengeluarkan tenaga dan waktu, tetapi petugas posyandu harus melakukannya

demi memutus mata rantai penyebaran Covid-19 di Padukuhan Nologaten.

Dapat dilihat bahwa organisasi Karang Taruna Padukuhan pun masih berjalan dengan menggandeng pemuda di dusun Nologaten lainnya dalam melakukan beberapa aktivitas keorganisasian. Meskipun bersifat accidental atau tanpa perencanaan tetapi lebih didasari oleh spontanitas, Karang Taruna Padukuhan Nologaten masih tetap berupaya untuk terlibat dalam upaya penanganan Covid-19 dengan bergerak di masing-masing RW dan tetap terkoordinir dalam kegiatan kepemudaan lainnya seperti usaha cuci motor yang diprakarsai bersama. Tetap aktifnya Lembaga Karang Taruna di Padukuhan adalah orientasi terwujudnya penumbuhan dan pengembangan semangat kebersamaan, jiwa kekeluargaan dan kesetiakawanan sosial yang diharapkan dapat terus terawat demi merawat marwah sebagai wadah pengemban tanggung jawab sosial yang bersifat rekreatif, kreatif, edukatif dan produktif.

f. Keadaan Kebudayaan dan Keagamaan

Masyarakat di Padukuhan Nologaten masih melestarikan kegiatan kebudayaan yang dimilikinya. Dalam rangka melestarikan kegiatan kebudayaan ini, masyarakat di Padukuhan Nologaten masih melakukan berbagai kegiatan seperti karawitan, gejog lesung, menyanyikan lagu-lagu daerah, tari-tarian, karnaval dalam rangka memperingati hari Kemerdekaan Negara Republik Indonesia (17 Agustus) dengan memakai pakaian petani atau dengan kreasi sayur-sayuran.

Dalam konteks agama, mayoritas masyarakat di Padukuhan Nologaten memeluk agama Islam yaitu sebanyak 1.350 jiwa (77%). Sementara itu, sekitar 1% (18 jiwa) masyarakat di Padukuhan Nologaten beragama Budha. Sedangkan sebanyak 262 jiwa (15%) masyarakat di Padukuhan Nologaten memeluk agama Katolik dan sebanyak 122 jiwa (7%) masyarakat memeluk agama Protestan. Di Padukuhan Nologaten terdapat 2 masjid yaitu Masjid An Nur dan Masjid Baitur Rohim serta 1 mushola Afiqroh. Masjid di Padukuhan Nologaten bukan hanya sebagai tempat sholat berjamaah saja, tetapi ada pengajian rutin yang diadakan setiap hari Kamis dan Minggu pagi. Setiap hari Kamis ada kegiatan membaca Surat Yasin dan Tahlil, sedangkan pada hari Minggu pagi (setelah subuh) ada kegiatan ceramah agama atau Tausiah.

Dari kultur yang hidup dalam diri masyarakat Padukuhan Nologaten, menjadi tanggung jawab Karang Taruna Padukuhan Nologaten untuk tetap menghidupi kebiasaan-kebiasaan atau tradisi tersebut di tengah arus globalisasi yang kian bergerak masif, karena selain senantiasa berinovasi bergerak maju, Karang Taruna adalah wadah yang menumbuhkan generasi muda yang mencintai dan memiliki kepedulian dalam merawat kultur budaya daerah setempat. Dengan demkian, dapat dikatakan bahwa masyarakat Padukuhan Nologaten masih mempunyai komitmen yang kuat dalam menjalankan kegiatan sosial.

g. Keadaan Prasarana

Prasarana dapat dimanfaatkan dan digunakan oleh masyarakat sekitar. Prasarana meliputi prasarana ibadah, prasarana pendidikan, dan prasarana umum lainnya. Berikut adalah tabel prasarana.

Tabel 2.8

Prasarana di Padukuhan Nologaten

No	Prasarana	Jumlah
1	Posyandu	4
2	Masjid An Nur dan Baitur Rohim	2
3	Musholla Afiqroh	1
4	Pos Kamling	1
5	Paud SPS Jasmine	1
6	TK Kusuma 1	1
7	Gubug Budaya	1
8	Gedung Serba Guna	1
9	Perpustakaan Cinarito	1
10	Sawah KWT	1
11	Galeri Jasmine	1
12	Pasar Desa	1

13	Pendopo Ekowisata	1
14	Angkringan Soponyono	1
Jumlah		18

(Sumber: Profil Padukuhan Nologaten Tahun 2021)

Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa prasarana publik di Padukuhan Nologaten cukup banyak untuk memfasilitasi segala kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat di Padukuhan Nologaten. Prasarana publik ini digunakan untuk kegiatan keagamaan, kegiatan kesehatan, kegiatan ekonomi, kegiatan seni, dan kegiatan sosial kemasyarakatan, kegiatan pendidikan dan lain sebagainya.

Sebagai salah satu organisasi yang digerakan oleh kaum muda yang tentunya memiliki mobilitas yang tinggi, sarana dan prasarana yang telah dimiliki oleh Padukuhan Nologaten dapat digunakan sebagai fasilitas penunjang program nyata Karang Taruna seperti dalam Bidang Edukatif, Karang Taruna dapat menginisiasi pemanfaatan perpustakaan cinarito untuk mendampingi anak-anak usia sekolah, mengaji dan mengasah kemampuan diri, fasilitas lain yang dapat digunakan oleh Karang Taruna Padukuhan Nologaten adalah dengan memanfaatkan pasar desa atau angkringan soponyono yang berlokasi di Nologaten untuk memasarkan olahan makanan atau segala bentuk produksi Karang Taruna sendiri serta mengoptimalkan tempat ekowisata sebagai tempat untuk berdiskusi bersama, merawat kebersamaan sekaligus menjadi ruang demokrasi bagi Karang Taruna.

3. Kondisi Struktur Pemerintahan

Tabel berikut ini akan menunjukkan struktur pemerintahan Padukuhan Nologaten.

Tabel 2.9

Struktur Pemerintahan

No	Nama Organisasi	Nama Ketua
1	Dukuh	Sulistyo Eko Narmono, A. Md
2	RW 1	Adek Prasetya
3	RW 2	Abdi Manaf
4	RW 3	Jono
5	RW 4	Purwoko

(Sumber: Profil Padukuhan Nologaten Tahun 2021)

Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa dalam menjalankan tugasnya sebagai Dukuh, Bapak Sulistyo Eko Narmono dibantu oleh empat (4) orang ketua RW. Selain itu, Dukuh juga dibantu oleh sepuluh (10) orang Ketua RT serta lembaga kemasyarakatan seperti PKK, KWT Jasmine, Karang Taruna dan sebagainya. Dalam hal ini Padukuhan bersinergis dengan semua organisasi kemasyarakatan yang ada seperti Karang Taruna dengan mengadakan kegiatan-kegiatan sosial seperti Bantuan Sosial, Penyelenggaraan Agenda lainnya yang dapat membantu pihak padukuhan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat karena tubuh Karang Taruna Padukuhan Nologaten terdiri dari

utusan-utusan pemuda setiap RW sehingga dapat menjadi wadah kolaboratif dan penuh dengan sinergitas.

C. Gambaran Umum Sub Unit Karang Taruna Padukuhan

1) Sejarah Karang Taruna Padukuhan Nologaten

Organisasi kepemudaan Nologaten terbentuk pada tanggal 24 Oktober 2020. Tetapi jauh sebelum diinstitusionalisasikannya Karang Taruna Padukuhan ini, gerakan pemuda sudah ada dan telah berjalan berdasarkan wilayah masing- masing di tingkat RW (Rukun Warga) . Perkumpulan muda-mudi ini dapat dinilai sebagai sebuah paguyuban yang terbentuk sejak lama dalam masyarakat padukuhan Nologaten, dimana setiap ada kegiatan atau event, disitulah terbentuk kesatuan muda-muda yang menaruh perhatian dalam pembangunan desa. Kepemudaan Nologaten sebelumnya bergerak berdasarkan wilayah RW, begitupun dalam melakukan program atau kegiatan. Namun pada tanggal 24 Oktober 2020, Gerakan Kepemudaan sudah diintegrasikan menjadi satu kesatuan Karang Taruna Padukuhan Nologaten berdasarkan musyawarah pemuda RW 1 sampai RW 4.

2) Asas Pembentukan

Terbentuknya Karang Taruna Nologaten ini berlandaskan pada asas:

a. Ketuhanan Yang Maha Esa;
b. Kemanusiaan;
c. Kebangsaan;
d. Kebhinekaan;
e. Demokratis;

f. Keadilan;

g. Partisipatif;

h. Kebersamaan;

i. Kesetaraan; dan

j. Kemandirian.

3) Visi Karang Taruna

Terciptanya pemuda Nologaten yang kreatif, inovatif, solid, dan peduli terhadap lingkungan padukuhan Nologaten maupun sekitarnya.

4) Misi Karang Taruna

a. Mengembangkan karakter sesuai minat dan bakat dalam bidang sosial, akademis, maupun non akademis;

b. Menjalin hubungan keakraban, keharmonisan, dan menumbuhkan kejujuran; dan

c. Sebagai wadah yang menampung aspirasi pemuda padukuhan Nologaten.

Sesuai dengan marwah Karang Taruna pada umumnya, Karang Taruna Padukuhan Nologaten didirikan dengan tujuan membentuk setiap anggota agar menjadi pribadi yang kreatif dan inovatif dalam kehidupan sehari-hari, memiliki sikap solidaritas dan toleransi terhadap sesama, mampu berpikir tanggap, kritis dan peduli terhadap perkembangan sekitar serta memiliki wawasan yang luas dan mengikuti perkembangan zaman. Orientasi diatas adalah jewantah dari tujuan umum Karang Taruna yang lebih mengedepankan kolektivitas pemuda dalam rangka mengemban tanggung jawab sosial, memberikan pelayanan dan menjadi wadah bagi pemuda untuk merumuskan langkah-langkah strategis atau program

kegiatan yang membantu masyarakat melestarikan kultur budaya sosial, memberikan inovasi yang mampu masyarakat bergerak maju, dan karang taruna mencapai tujuan mensejahterakan masyarakat serta berpikir kritis menangani setiap isu, Karang Taruna Padukuhan Nologaten dapat menyiasati perubahan atau gejala-gejala yang ada.

Fungsi dari Organisasi Karang Taruna Padukuhan Nologaten adalah:

a) Mengembangkan karakter sesuai dengan bidang minat dan bakat, seperti keolahragaan, keseniaan, kewirausahaan, keorganisasian, kependidikan dan keahlian khusus.
b) Mempererat hubungan antar sesama pemuda Nologaten dengan saling mengenal, saling menghargai, saling memahami, dan saling tolong menolong.
c) Sebagai wadah berkumpul, berdiskusi, berdinamika dan menampung aspirasi pemuda Nologaten.

Dari tujuan dan fungsi di atas, Karang Taruna Padukuhan Nologaten memetakan tugas Pokok Karang Taruna Padukuhan Nologaten adalah mengembangkan karakter sesuai minat dan bakat di bidang sosial akademis dan nonakademis, menjalin hubungan kekerabatan, keharmonisan, menumbuhkan kejujuran, pelaksanaan dan fungsi disesuaikan dengan keadaan, kepentingan dan perkembangan masyarakat dan lingkungan sekitar.

Kegiatan yang dilakukan oleh Karang Taruna Nologaten adalah berkumpul dan berdiskusi serta melakukan terobosan kegiatan seperti kegiatan teragenda dengan kegiatan yang bersifat spontanitas, kegiatan yang teragenda adalah kegiatan tujuh belasan dan Sumpah Pemuda sedangkan kegiatan-kegiatan yang lainnya meliputi

kegiatan pelatihan *boxing*, olahraga bersama, aktivitas mural, aksi menggalang dana Bantuan Sosial dan kegiatan lainnya yang tidak terduga yang memerlukan respons cepat Karang Taruna Padukuhan Nologaten.

5) Kepengurusan Karang Taruna

Setiap organisasi tentu memiliki struktur Kepengurusan untuk mengetahui hierarki kedudukan dan fungsi setiap jabatan. Berikut ini akan dipaparkan struktur organisasi Karang Taruna Padukuhan Nologaten.

Bagan 5.1

Struktur Organisasi Sub Unit Karang Taruna Padukuhan Noloagaten

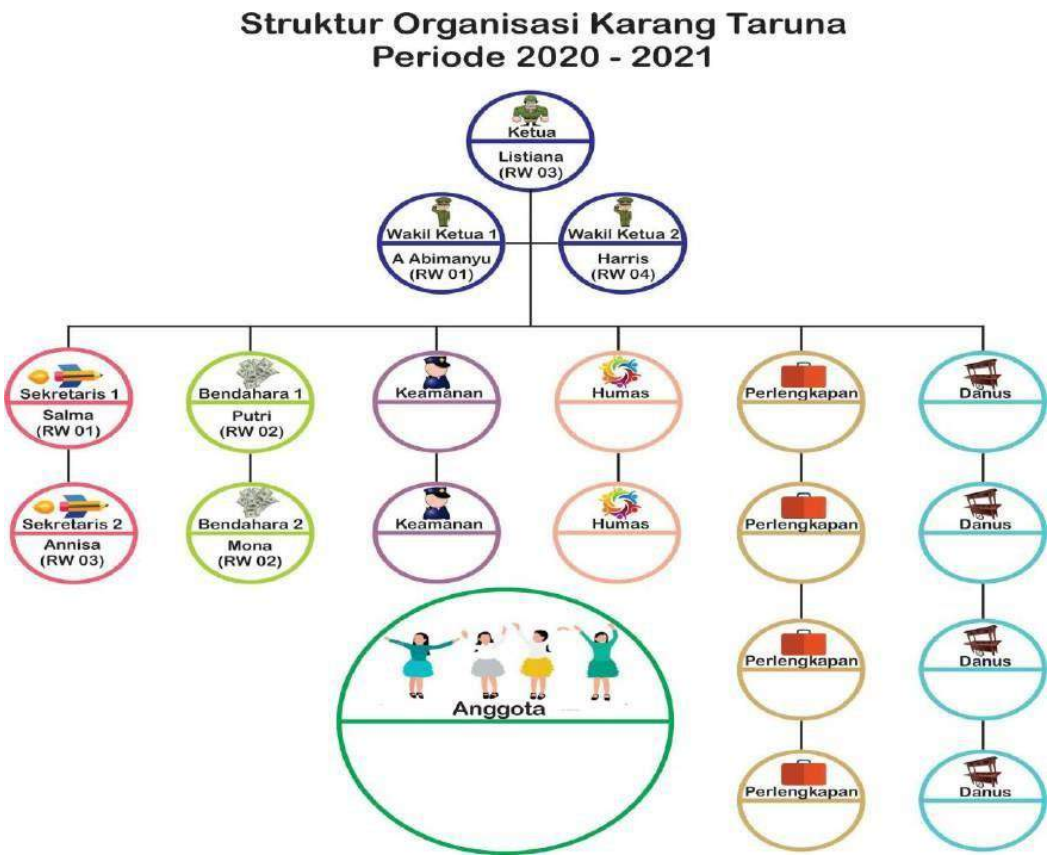

(Sumber: AD/ART Sub Unit Karang Taruna Padukuhan Nologaten)

DAFTAR PUSTAKA

Buku

A, Muri Yusuf. 2014. Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan. Jakarta: Prenadamedia Group.

Dayan, Anto, 1986. Pengantar Metode Statistik II, Jakarta: LP3ES.

Eko, Sutoro (Ed). 2005. Manifesto Pembaharuan Desa. Yogyakarta: APMD Press.

Eko, Sutoro. 2014. Desa Membangun Indonesia. Yogyakarta: Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD).

Eko, Sutoro. 2014. Undang-Undang Desa Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Yogyakarta: Forum Pengembangan Pembaharuan Desa.
Eko, Sutoro. 2015. Regulasi Baru Desa Baru. Jakarta Pusat: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Ife, Jim. 1995. Community Development: Creating Community Alternatives, Vision, Analysis and Practice. Australia: Longman.

Iryana, Kawasati Risky. Teknik Pengumpulan Data Metode Kualitatif. Sorong: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN).

Kurniadi, Edy. 1897. Peranan Pemuda dalam Pembangunan Politik di Indonesia. Bandung: Angkasa.

Lasa, HS, 2009, Kamus Kepustakawanan Indonesia. Yogyakarta. Pustaka Book Publisher.

Leitch, Laurie. 2017. An Introduction to the Social Risiliience Model, in Erkunde Vol.67 Nomor 1.

Moleong, Lexy J. 2012. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Oxfam Internasional. 2017. Menuju Indonesia yang Lebih Sejahtera. Oxford: Oxfam GB.

Putnam, Robert. 2000. Bowling Alone: America’s Declining Social Capital: Princeton University Press.

Rauf, Rahyunir dan Yusri Munaf. 2015. Lembaga Kemasyarakatan di Indonesia. Pekanbaru: Zanafa Publishing.

Sadewo, Yosua Damas. 2020. Pengantar Ketahanan Sosial, Ekonomi dan Ekologi. Banyumas: CV Pena Persada.

Sasono, Adi. 2013. Menjadi Tuan di Negeri Sendiri: Pergulatan Kerakyatan, Kemartabatan, dan Kemandirian. Jakarta: Grafindo Books Media.

Semiawan, Conny. R. 2010. Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan Keunggulanya. Jakarta: PT Grasindo.

Silahuddin, M. 2015. Kewenangan Desa dan Regulasi Desa. Jakarta Pusat: Kementerian Desa, Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi.

Sugiyono. 2005. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: CV. Alfabeta, hlm:83

Sugiyono, 2013. Metode Penelitian Administrasi (Dilengkapi dengan Metode R&D), Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2007. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Rosdakarya.

Suharto, Edi. 2005. Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat. Bandung: PT Refika Aditama.

Supranto, J. 2000. Teknik Sampling Untuk Survey dan Eksperimen. Jakarta: PT Rineka Cipta.

Taufik, Abdullah. 1974. Pemuda dan Perubahan Sosial. Jakarta: PT Pustaka LP3ES Indonesia.

Triputro, Widodo. 2019. Regulasi Desa. Yogyakarta: CV Budi Utama.

Warsilah, Henny, dkk. 2018. Ketahanan Sosial Dalam Kota Tangguh Bencana. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Widjaja. 2003. Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat, dan Utuh. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Jurnal

Agustina, Dwi Pela. 2018. Peningkatan Capacity Building Pemuda Karang Taruna Bakti Mandiri dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat. Yogyakarta: Universitas Amikom Yogyakarta, Seminar Hasil Pengabdian Masyarakat.

Agustina, Dwi Pela. 2019. Peningkatan Partisipasi Pemuda di Karang Taruna Kampung Sono Melalui Implementasi Community Development.Yogyakarta: Universitas Amikom Yogyakarta, Seminar Hasil Pengabdian Masyarakat.

Andrayani, Anak Agung Istri. Jurnal Ketahanan Nasional. Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Desa Wisata Dan ImplikasinyaTerhadap Ketahanan Sosial Budaya Wilayah. 2017.

Arfidiandra, Aldita Cindy, Riana Rahmaningrum, Wazirul Luthfi. 2020. Ketahanan Sosial Berbasis Kelompok Peduli Lingkungan dalam Menghadapi Pandemi COVID-19: Studi pada Gerakan Bersih Kecamatan Anggana. Journal of Social Development Studies.

Eko, Sutoro. Government Making: Membuat Ulang Ilmu Pemerintahan. Yogyakarta: STPMD "APMD", Jurnal Governabilitas Vol. 2 No. 1. 2021.

Haryono, Tri. Partisipasi Perempuan Desa Karangsari dalam Mewujudkan Pembangunan Inklusif. Islamic Review: Jurnal Riset dan Kajian Keilmiahan, Volume IX, Nomor 2, Oktober 2020.

Hasanah, Hasyim. Teknik-teknik Observasi: Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-Ilmu Sosial. Jurnal at-Taqaddum Volume 8 Nomor 1 Januari 2017.

Hiryanto, Entoh Tohani. 2020. Peningkatan Kapasitas Pengurus Karang Taruna Melalui Optimalisasi Modal Sosial dalam Pengembangan Desa Wisata. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, DIKLUSl Jurnal Pendidikan Luar Biasa.

Keck, Markus dan Patrick Sakdalporak. What is Social Resillience? Lesson Learned Ways Forward, dalam Erkunde Volume 67 Nomor 1. 2013

Kamahi, Umar. 2017. Teori Kekuasaan Michel Foucault: Tantangan Bagi Sosiologi Politik. Kupang: Universitas Nusa Cendana, Jurnal Al-Khitabah Volume III, Nomor 1.

Mizwar, Dedi. 2021. Bentuk Variasi Partisipasi Politik Masyarakat di Ruang Publik. Yogjakarta: Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD".

Nardin, Yulianus. 2019. Kebijakan Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Pada Program BUMDes. Malang: Universitas Tri Buana Tunggadewi. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Volume 8, Nomor 3.

Probosiwi, Ratih. Desa Inklusi sebagai Perwujudan Pembangunan Berelanjutan Bagi Penyandang Disabilitas. Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial Volume 41 Nomor 3, Desember 2017.

Ra'is, Dekki Umamur. Peta Inklusi Sosial dalam Regulasi Desa. Jurnal Reformasi Volume 7 Nomor 2, 2017.

Roni, Ardiano. 2019, Implementasi Nilai-Nilai Persatuan pada Kegiatan Karang Taruna : Universitas Muhammadadiyah Surakarta.

Suradiva Oka. 2018. Partisipasi Pemuda Dalam Pengembangan Desa Wisata Guna Meningkatkan Ketahanan Sosial Budaya Masyarakat Desa. Jurnal Ketahanan Nasional.

Susilo, Hadi. 2018. Pengaruh Gaya Kepemimpinan Transformasional DanBudaya Kerja Terhadap Kedisiplinan Kerja Pegawai Kalurahan Caturtunggal Depok Sleman. Jogjakarta: Universitas SarjanawiyataTamansiswa, Jurnal Ekobis Dewantara Volume Nomor 6.

Swift, C. and G Lein, Empowerment: An Emerging Mental Health Technology, In Joirnal of Primary Prevention, 1987.

Internet

https://eprints.umpo.ac.id

https://etheses.uin.malang.ac.id

https://repository.unpas.ac.id

https://jogja.tribunnews.com

Sumber Lain

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Karang Taruna.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJMKal) 2021-2026. Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Caturtunggal; Tahun 2022.

AD/ART Sub Unit Karang Taruna Padukuhan Nologaten.